

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus BPKAD Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Oleh:

MUTIA AULIA SAFRIDHA

NIM. 0502163157

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
T.A. 2019-2020**

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus BPKAD Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

MUTIA AULIA SAFRIDHA

NIM. 0502163157

**Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
T.A. 2019-2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Mutia Aulia Safridha**
NIM : 0502163157
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 13 Juni 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Taruna Jaya RT 003/014 Cibubur, Jakarta Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus BPKAD Provinsi Sumatera Utara)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 4 Juni 2020

Yang membuat pernyataan



Mutia Aulia Safridha
NIM. 0502163157

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus BPKAD Provinsi Sumatera Utara)**

Oleh:

MUTIA AULIA SAFRIDHA

NIM: 0502163157

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 4 Juni 2020

Pembimbing I



Dr. Muhammad Ridwan, M.A
NIP. 197608202003121004

Pembimbing II



Rahmat Daim Harahap, S.E.I, M.Ak
NIP. 199009262018031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Hendra Harmain, M.Pd
NIP. 197305101998031003

Skripsi berjudul “**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)**”, Mutia Aulia Safridha, NIM. 0502163157 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 17 Juni 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

Medan, 17 Juni 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,



Hendra Harmain, M.Pd
NIP. 197305101998031003

Sekretaris,



Kusmilawaty, S.E, Ak, M.Ak
NIP. 198006142015032001

Anggota

Pembimbing I



Dr. Muhammad Ridwan, M.A
NIP. 197608202003121004

Pembimbing II



Rahmat Daim Harahap, S.E.I, M.Ak
NIP. 199009262018031001

Penguji I



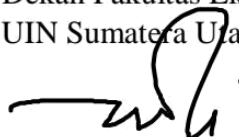
Dr. Sugianto, MA
NIP. 196706072000031003

Penguji II



Kusmilawaty, S.E, Ak, M.Ak
NIP. 198006142015032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara



Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

ABSTRAK

Mutia Aulia Safridha (2019) “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus BPKAD Provinsi Sumatera Utara)” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Ridwan, M.A sebagai Pembimbing Skripsi I dan Rahmat Daim Harahap, SEI. M.Ak sebagai Pembimbing Skripsi II.

Aspek-aspek masalah yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Teknik Analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan hasil kuesioner diterima kembali untuk diolah. Data dianalisis dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian berdasarkan uji t menunjukkan kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta hasil penelitian berdasarkan uji F menunjukkan kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan koefisien determinasi 75,5%. Dari pengujian statistik menunjukkan adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci : Sumber Daya Manusia yang Berkaitan dengan Pembuatan Laporan Keuangan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala nikmat segala nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat umur yang panjang dan nikmat kelapangan waktu yang telah Allah beri kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus BPKAD Provinsi Sumatera Utara)”**. Tidak lupa shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Suri Tauladan Umat Islam ialah Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita masuk kedalam jajaran umat nya yang mendapatkan naungan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya berkat bantuan dari banyak pihak yang telah ikut membantu secara materil maupun nonmateril. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang yang terkait didalam terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih yang teristimewa kepada dua makhluk luar biasa yang menjadi perantara lahirnya penulis di muka bumi ini, ialah kedua orang tua penulis, Ayah Ruul Ahyar Lubis dan Ibu Enni tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan tak pernah henti, doa yang tak pernah putus kepada penulis. Salam cinta dan takjub penulis untuk kalian berdua.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Kusmilawaty, S.E, Ak, M.Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Muhammad Ridwan, M.A selaku Pembimbing Skripsi I, yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Rahmat Daim Harahap, S.E.I, M.Ak selaku Penasehat Akademik dari Semester I-VIII, yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, nasehat, dan pemahaman dalam menyelesaikan akademik ini sekaligus Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang luar biasa serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
8. Para pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Utara yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan banyak memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian.
9. Kepada adik dan kakak ku tersayang Maya Amelia dan Maulana Muhammad yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungannya kepada penulis untuk menyelesaikan akademik ini.
10. Kepada aa Noviana Nurhikmat yang telah banyak mendukung dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada temanku yang di Jakarta, Nafira Mega Sapsuha, Ria Datul Izzah, Nurul Maimunah, Qory Octarin, Seli Meliani yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat dan dukungan yang tiada henti-hentinya di setiap perjuanganku kuliah di UIN-SU.

12. Teruntuk teman-teman sekelasku, Novia Putri Afifah, Yuni Astrina, Annesiya Sonaya, Maulina Annisak, dsb, terimakasih telah memberikan banyak kenangan dan pengalaman luar biasa dan telah menjadi teman terbaik selama masa perkuliahan yang sama-sama berjuang dari semester I-VIII. Sukses untuk kita semua. Aamiin.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak mungkin penulis tuliskan semuanya, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya, kepada Allah jualah penulis memohon ampun dan menyerahkan diri, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Wassalamualaikum,
Medan, 4 Juni 2020

Penulis



Mutia Aulia Safridha
NIM. 050163157

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Perumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	10
a. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	10
b. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	12
c. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	14
d. Entitas Pelaporan Keuangan.....	15
e. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	16

f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia	18
a. Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	18
b. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pandangan Islam	20
c. Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia	21
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.....	21
a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah.....	21
b. Basis Standar Akuntansi Pemerintah	22
c. Indikator Standar Akuntansi Pemerintah	24
4. Sistem Pengendalian Internal	28
a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal.....	28
b. Tujuan Sistem Pengendalian Internal.....	28
c. Indikator Sistem Pengendalian Internal	28
B. Kajian Terdahulu.....	31
C. Kerangka Teoritis.....	36
D. Hipotesa.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
1. Lokasi Penelitian	40
2. Waktu Penelitian.....	40
C. Populasi dan Sampel	41
1. Populasi	41
2. Sampel	41
D. Data Penelitian	42

1. Jenis Data.....	42
2. Sumber Data	42
E. Definisi Operasional.....	42
F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
1. Statistik Deskriptif.....	45
2. Uji Kualitas Data	45
a. Uji Validitas	45
b. Uji Reliabilitas.....	46
3. Uji Asumsi Klasik	46
a. Uji Normalitas	46
b. Uji Multikolinearitas	46
c. Uji Heterokedastisitas	47
4. Regresi Linear Berganda	47
5. Uji Hipotesis Penelitian.....	48
a. Uji t (<i>t-test</i>).....	48
b. Uji F (<i>F test</i>).....	49
c. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51
1. Sejarah BPKAD Provinsi Sumatera Utara	51
2. Visi dan Misi BPKAD Provinsi Sumatera Utara.....	52
a. Visi BPKAD Provinsi Sumatera Utara	52
b. Misi BPKAD Provinsi Sumatera Utara.....	52
3. Tugas Pokok BPKAD Provinsi Sumatera Utara	53
a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara	53

b.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Menyelenggarakan Fungsi.....	53
4.	Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.....	53
a.	Struktur Organisasi.....	53
b.	Pembagian Tugas	54
B.	Deskripsi Data Penelitian.....	67
1.	Uji Deskriptif.....	67
a.	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	67
b.	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur	68
c.	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan	69
d.	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Lama Bekerja.....	69
e.	Analisis Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Berkaitan dengan Pembuatan Laporan Keuangan (X_1).....	70
f.	Analisis Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_2).....	72
g.	Analisis Variabel Sistem Pengendalian Internal (X_3)	74
h.	Analisis Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y).....	75
2.	Uji Kualitas Data.....	77
a.	Uji Validitas	77
b.	Uji Reliabilitas.....	81
C.	Uji Asumsi Klasik.....	83
1.	Uji Normalitas	83
2.	Uji Multikoleniaritas.....	84
3.	Uji Heterokedastisitas.....	85
D.	Regresi Linear Berganda.....	86
E.	Uji Hipotesis	87
1.	Uji t (t-test)	87

2. Uji F (F test)	89
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	89
F. Pembahasan.....	90

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN..... 97

A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1 Kajian Terdahulu	31
3.1 Waktu Penelitian	40
3.2 Jumlah Pegawai yang Terlibat dalam Pembuatan Laporan Keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara	41
3.3 Definisi Operasional Variabel	43
3.4 Skor/Bobot Penilaian Menggunakan Skala Likert	44
4.1 Data Sampel Penelitian	67
4.2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin	68
4.3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur	68
4.4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan	69
4.5 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Lama Bekerja	70
4.6 Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Berkaitan dengan Pembuatan Laporan Keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara.....	71
4.7 Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah BPKAD Provinsi Sumatera Utara	72
4.8 Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Sistem Pengendalian Internal BPKAD Provinsi Sumatera Utara	74
4.9 Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Kualitas Laporan Keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara	76
4.10 Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia	78
4.11 Uji Validitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.....	79
4.12 Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal	80
4.13 Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan	81
4.14 Uji Reliabilitas X1	81
4.15 Uji Reliabilitas X2	82
4.16 Uji Reliabilitas X3	82

4.17 Uji Reliabilitas Y	83
4.18 Uji Normalitas	84
4.19 Uji Multikolinearitas	85
4.20 Uji Heterokedastisitas	86
4.21 Uji T	88
4.22 Uji F	89
4.23 Uji R ²	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1	Kerangka Teoritis	36
4.1	Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Utara	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Hal
I	Surat Penelitian	102
II	Kuesioner	104
III	Frekuensi Data Berdasarkan Identitas	109
IV	Hasil Uji Validitas	110
V	Hasil Jawaban Responden	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum. Akuntansi pemerintah memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Pengertian akuntansi adalah suatu proses pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis serta pengkomunikasian informasi keuangan yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi.¹

Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD disusun serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.² Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan atas kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Karakteristik kualitatif yang disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.³

¹ Rosmery Elsy, et. al., *Dasar-Dasar Akuntansi AkruaI Pemerintah Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h. 39.

² Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32, h.16.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Paragraf 35-40, h.10.

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan, pemerintah merevisi PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan regulasi akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis cukup kompleks sehingga diperlukan penerapan yang utuh mengenai konsep akuntansi. Jika penerapan regulasi atas PP 71 tahun 2010 rendah maka kualitas laporan keuangan menjadi rendah. Dasar pemikirannya adalah penerapan terhadap aturan yang tidak penuh mengindikasikan implementasi aturan cenderung menggunakan insting dibandingkan aturan yang berlaku. Rendahnya keterampilan dasar mengenai penerapan menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Sehingga, tinggi-rendahnya tingkat penerapan regulasi akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan.⁴

Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal yang dimiliki institusi pemerintah daerah. Pengendalian internal yang lemah menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan/ketidakkuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten. Terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Seperti tulisan dalam temuan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2006-2007 mendapat opini dari BPK RI “Tidak Wajar (TW)”, pada tahun 2008-2013 BPK RI memberi opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”, dan pada

⁴ Ida Ayu Enny Kiranayanti, “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” dalam *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 16.2, Agustus 2016, h. 1297.

tahun 2014-2018 BPK RI memberi opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”⁵. Berdasarkan opini tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengalami kenaikan yang signifikan, terutama mendapat opini WTP selama 5 kali pada tahun 2014-2018 akan tetapi opini WTP bukan berarti benar tanpa pengecualian melainkan WTP artinya masih ada temuan-temuan yang masih harus ditindaklanjuti dan dicari solusinya antara lain;

Temuan atas sistem pengendalian internal:⁶

1. Pergeseran Anggaran Rincian Obyek Belanja 43 Organisasi Perangkat Daerah
2. (OPD)/Satuan Kerja (SatKer) tidak ditetapkan melalui Peraturan Daerah perubahan APBD
3. Saldo Dana Bergulir masih dikuasai PT. Bank Sumut dan Penjaminan Pinjaman tidak sesuai ketentuan
4. Penataan Aset Tetap belum memadai, antara lain permasalahan tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti, permasalahan penilaian aset, dan pencatatan aset

Temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:

1. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan, yang merupakan kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas, realisasi kegiatan kunjungan kerja tidak sesuai kenyataannya, belanja perjalanan dinas yang tidak didukung bukti yang lengkap, dan pertanggungjawaban belanja BBM kendaraan dinas yang tidak didukung bukti yang lengkap. Atas kerugian tersebut telah dipulihkan dengan penetapan piutang.

⁵ “Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2006-2018”, <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada 1 November 2019.

⁶ “Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018”, <http://www.medan.bpk.go.id>. Diakses pada 1 November 2019.

2. Pelaksanaan pekerjaan pada 8 (delapan) OPD/SatKer tidak sesuai kontrak, yang meliputi kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran

Permasalahan kompetensi sumber daya manusia yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini sudah melakukan bimbingan teknis (BimTek) selama dua kali dalam setahun, namun masih terdapat permasalahan kompetensi sumber daya manusia yang ditemukan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah kurang kompeten akuntan yang memadai untuk mengelola aset dengan baik seperti permasalahan aset tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti, permasalahan penilaian aset, dan pencatatan aset sehingga banyak laporan keuangan dan aset yang menjadi temuan BPK.

Saat ini Musa Rajekshah (wakil gubernur Sumatera Utara) segera melakukan perbaikan terkait dengan penyelesaian inventarisasi aset yang diberi batas waktu hingga Oktober 2019 dan dibentuk tim khusus yang akan mendatangi setiap OPD untuk melihat daftar aset yang sudah diinventarisir serta bagi OPD yang tidak menyelesaikan daftar inventaris asetnya akan diberi catatan khusus, dimana catatan khusus tersebut bisa digunakan sebagai bahan penilaian atau pertimbangan untuk promosi jabatan pimpinan OPD yang bersangkutan, hal tersebut dikarenakan bahwa menurut beliau aset haruslah dipertahankan, bahkan ditambah bukan malah berkurang. Karena itu, seluruh OPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumut harus segera berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut untuk menyelesaikan permasalahan aset, seperti aset berupa tanah yang harus memiliki legalitas. Banyak tanah pemerintah yang tidak memiliki sertifikat. Keadaan tersebut harus diselesaikan, karena semakin hari tanah semakin dibutuhkan manusia dimana memiliki nilai ekonomi yang tinggi.⁷

⁷ Zailani, "Wakil Gubernur Sumatera Utara Deadline OPD dan BUMD Selesaikan Aset", <http://sumut.sindonews.com>. Diakses pada 2 November 2019.

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (penerapan standar akuntansi pemerintah) dan sistem pengendalian internal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini diantaranya:⁸

1. Pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Dinas Pendidikan (Disdik) belum tertib dan terdapat sisa dana BOS pada SMK dan SMA Negeri belum disajikan pada LK minimal sebesar Rp 1,09 miliar.
2. Inventarisasi dan verifikasi faktual aset dalam rangka pengalihan Personil, Prasarana dan Dokumen (P2D) belum memadai serta pencatatan dan penatausahaan aset tetap belum tertib.
3. Temuan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan antara lain pembayaran belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan (Setwan) dan Disdik tidak sesuai fakta sebenarnya sebesar Rp 5,47 miliar. Dari jumlah itu telah dipulihkan dengan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp 3,19 miliar.
4. Ditemukan juga pelaksanaan volume pada 21 pekerjaan di empat satker atau OPD tidak sesuai kontrak sebesar Rp 5,47 miliar. Dari jumlah itu telah dipulihkan dengan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp 1,31 miliar.

Anggota V BPK RI, Isma Yatun, menyebut pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan bukan bertujuan untuk mengungkap adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Hanya saja, ketika ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap perundang-undangan khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka tetap akan dituangkan dan diungkap di dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan).

"Opini (WTP) yang diberikan oleh pemeriksa merupakan pernyataan profesional pemeriksaan kewajaran laporan keuangan, bukan menjadi jaminan tidak adanya kecurangan yang ditemui," ujar Isma Yatun di gedung DPRD Sumut,

⁸ "Catatan Berita Mei 2018 – BPK: Opini WTP Bukan Jaminan Tak Ada Kecurangan.", <http://www.medan.bpk.go.id>. Diakses pada 2 November 2019.

Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (24/5/2018). Dari fenomena di atas dapat dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki temuan permasalahan sistem pengendalian internal yang harus segera ditindaklanjuti dan dicari solusinya.

Sebelumnya banyak peneliti yang telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan T. Asri Yunita pada tahun 2015, dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kota Dumai) menunjukkan hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ade Saputra pada tahun 2015, dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada SKPD Kabupaten Kampar) menunjukkan hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Arlia Sari Artana pada tahun 2016, dengan judul Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan juga penelitian yang dilakukan oleh Putri Syukria Lubis pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada PD. Pasar Kota Medan yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan

sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan PD. Pasar Kota Medan.

Dari hasil pemaparan yang terkait dengan fenomena yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melihat adanya hubungan antara kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus BPKAD Provinsi Sumatera Utara)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Kurangnya kompetensi akuntan yang memadai untuk mengelola aset dengan baik seperti permasalahan aset tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti, permasalahan penilaian aset, dan pencatatan aset.
2. Kurangnya penerapan standar akuntansi dan sistem pengendalian internal dilihat dari adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Masih banyaknya temuan BPK dalam APBD tahun anggaran 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi pada pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah (studi kasus BPKAD Provinsi Sumatera Utara) dalam hasil temuan BPK RI tahun anggaran 2018.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari hasil penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara?
- b. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara
- c. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara
- d. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

a. Mahasiswa/penulis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang akuntansi sektor publik yang digunakan oleh BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi pandangan dan pembanding untuk menuliskan skripsi yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik.

c. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Sebagai bahan masukan bagi seluruh pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

d. Bagi masyarakat dan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah

Dapat memberikan pengetahuan mengenai kondisi akuntansi sektor publik yang dialami BPKAD Provinsi Sumatera Utara

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Pencatatan transaksi merupakan perintah Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 282, yang dituangkan dalam lembaran kertas sebagai bukti telah melakukan pencatatan yang disebut dengan bukti transaksi. Dalam konteks yang lebih luas, setiap umat manusia bermuamalat yang menimbulkan transaksi baik dalam skala kecil maupun besar harus mencatatkannya. Secara filosofis tujuan pencatatan adalah untuk menghindari kesalahan karena manusia bersifat lupa baik yang bersifat kewajiban maupun yang menjadi hak bagi setiap manusia yang bermuamalat.⁹ Hal ini dinyatakan dalam QS Al-Baqarah ayat 282, yaitu:¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

⁹ Syahman Sitompul, et. al., *Akuntansi Mesjid*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015), h. 7.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Tafsir* (Bandung: Sygma, 2010), h.

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dari sisi objek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki negara, dan /atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan /atau penguasaan objek sebagaimana tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.¹¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kualitas adalah (1) tingkat baik buruknya sesuatu atau (2) taraf atau derajat.¹² Laporan keuangan secara umum adalah laporan yang menyajikan informasi berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.¹³ Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pengguna adalah masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan

¹¹ Isnaini Harahap et. al, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 229.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kualitas", <http://www.kbbi.kemendikbud.go.id>. Diakses pada tanggal 3 November 2019.

¹³ Deddi Nordiawan dan Ayunintyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 205.

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), investor/kreditor, manajemen pemerintah, dan lembaga internasional.¹⁴

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah adalah tingkat baik buruknya suatu laporan keuangan pemerintah daerah untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan dan untuk memenuhi kebutuhan penggunaannya.

b. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1) Relevan (*Relevance*)

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. Informasi yang relevan meliputi hal-hal sebagai berikut :

a) Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu (*Timeliness*)

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpegaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

¹⁴ Ibid., h.135.

d) Lengkap (*Complete*)

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal (*Reliable*)

Informasi dalam laporan keuangan dikatakan andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Informasi yang andal memenuhi karakteristik

a) Penyajian Jujur (*Representational Faithfulness*)

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi (*Verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas (*Neutral*)

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan (*Comparable*)

Informasi dalam laporan keuangan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapat dipahami (*Understandable*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami apabila disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas penerapan para pengguna. Pengguna diasumsikan mempunyai pengetahuan mengenai kegiatan operasi entitas pelaporan.

Dalam penerapannya, karakteristik ini merupakan indikator yang menjadi alat ukur atas kualitas laporan keuangan.

c. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran
- 2) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

d. Entitas Pelaporan Keuangan

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

e. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komponen Laporan Keuangan pokok dalam Pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran, yaitu jenis laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran, yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atas penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
- 3) Neraca, yaitu menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- 4) Laporan Operasional, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- 5) Laporan Arus Kas, yaitu laporan yang menyajikan informasi sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu laporan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- 7) Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil kajian penelitian tentang penentu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Adanya kompetensi sumber daya manusia maka akan mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan. Menurut Putriasri Pujanira (2017) bahwa semakin tinggi Kompetensi Sumber Daya Manusia Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan baik, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan akan semakin baik. Sebaliknya, apabila Kompetensi Sumber Daya Manusia rendah, dapat menimbulkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang kurang baik.¹⁵

2) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Penerapan standar akuntansi pemerintah merupakan sebuah proses untuk mengerti benar tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Arlia

¹⁵ Putriasri Pujanira, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY" dalam *Jurnal Nominal*, Vol. VI nomor 2, 2017, h. 26.

Sari Artana (2016) penyusunan pedoman akuntansi sangat diperlukan. Hal tersebut semakin relevan mengingat adanya batas waktu bagi organisasi publik untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban yang berisi laporan keuangan sudah semakin mendesak.¹⁶ Sehingga dengan memahami standar akuntansi pemerintah maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

3) Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁷

Menurut Nyoman Triyadi Agustiawan dan Ni Ketut Rasmini (2016), bahwa semakin baik sistem pengendalian internal maka akan berdampak meningkatnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.¹⁸

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.¹⁹ Pada dasarnya, sumber daya manusia adalah suatu sumber daya

¹⁶ Arlia Sari Artana, “*Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h. 27.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, h. 2.

¹⁸ Nyoman Triyadi Agustiawan dan Ni Ketut Rasmini, “*Pengaruh Sistem Berbasis Akrua, TI, dan SPIP pada Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi SDM sebagai Moderasi*” dalam *E-journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2016, h. 3495.

¹⁹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Ketenagakerjaan, h. 3.

yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sebab, sumber daya manusia adalah sumber yang berperan aktif terhadap jalannya suatu organisasi dan proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang terbaik yang dihasilkan oleh suatu sumber daya manusia menunjukkan kinerja seseorang dan kemampuannya untuk menganalisis suatu masalah dalam lingkup kerja dan jabatannya. Namun hal tersebut juga tidak terlepas dari kejelian dan ketepatan dalam proses menentukan seorang pegawai untuk berada dalam suatu pekerjaan dan jabatan tertentu. Pegawai yang mampu melakukan pekerjaan tertentu mungkin akan lebih tepat dan baik jika dia ditempatkan pada bidang tertentu juga. *The right man on the right place*, akan membawa suatu organisasi pada hasil kinerja yang maksimal dan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam tugas atau pekerjaan.²⁰ Sumber daya manusia diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Agar menjadi sebuah kekuatan, sumber daya manusia harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya.²¹

Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Nomor 13 Tahun 2011, kompetensi manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul dalam jabatan tertentu.²²

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan terwujudnya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

²⁰ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2009), h. 2

²¹ Ibid., h. 4.

²² Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, h. 5.

b. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pandangan Islam

Kerja dalam Islam dipandang sebagai *mode of existence* (bentuk keberadaan) manusia itu sendiri. Manusia ada karena kerjanya, dan ia akan dipandang dan dinilai berdasarkan kerja atau amalnya. Disamping itu Islam memandang kerja bukanlah hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat primer, sekunder, atau tersier, melainkan kerja juga memiliki nilai ibadah. Disebabkan kerja memiliki nilai ibadah, maka kerja tersebut harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk ajaran agama. Kerja dalam pandangan Islam tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan material (upah), tetapi lebih dari itu, kerja merupakan bagian dari pelaksanaan perintah Allah kepada manusia untuk bekerja yang baik (*'amilu al-shalihah*, dan *ahsanu 'amala*).²³ Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf (46) ayat 19 yang berbunyi²⁴:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤَفِّقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:

“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.”

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa Allah akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan, artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kompetensi yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari pekerjaannya tersebut dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya

²³ Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Medan: FEBI Press, 2016), h. 132.

²⁴ Kementerian Agama RI, Op. Cit., h. 504.

c. Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Putri Syukria Lubis (2018), indikator kompetensi sumber daya manusia dapat dilihat dari berbagai dimensi, diantaranya adalah sebagai berikut:²⁵

1) Kompetensi

Kompetensi sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan.

2) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan, sehingga meningkatkan kecakapan manajerial pegawai dan pelayanan pegawai setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan.

3) Pengalaman di Bidang Keuangan

Pengalaman di bidang keuangan, yaitu sumber daya manusia yang memahami teori keuangan, memahami aturan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PP No. 70 tahun 2010, dan mampu mengkomunikasikan hasil dari laporan keuangan.

3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah memahami PP Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

²⁵ Putri Syukria Lubis, *“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada PD. Pasar Kota Medan”* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU, 2018), h. 24.

b. Basis Standar Akuntansi Pemerintah

Di Indonesia pada tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Sejak diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, basis akuntansi yang digunakan adalah menggunakan basis akrual. Hal ini dengan jelas dinyatakan pada pasal 4 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

“Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual”. “SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam bentuk PSAP”.

Lebih lanjut pada ayat 4 dinyatakan bahwa:

“PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tercantum dalam Lampiran I yang tidak dapat terpisahkan dari peraturan pemerintah ini”.

Lampiran I yang dimaksud adalah SAP Berbasis Akrual yang terdiri atas Kerangka Konseptual dan PSAP Nomor 01 sampai dengan PSAP Nomor 12. Implementasi dari peraturan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 10 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah bahwa penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Sesuai dengan peluncuran draf SAP (*exposure draft*), basis akrual untuk neraca berarti bahwa aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana diakui serta dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara

kas diterima atau dibayar. *International Monetary Fund* (IMF), sebagai lembaga kreditor, menyusun *Government Finance Statistics* (GFS) yang di dalamnya menyarankan kepada negara-negara debitornya untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan. Alasan penerapan basis akrual ini, karena saat pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya. Jadi, basis akrual menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro. Selain itu, basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dapat dicatat, termasuk transaksi internal.

Informasi yang disajikan pada akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan memungkinkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka hal berikut:

- 1) Menilai akuntabilitas pengelolaan sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya tersebut
- 2) Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas
- 3) Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas

Pelaporan dengan basis akrual akan dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan dananya
- 2) Memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya
- 3) Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya
- 4) Memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya
- 5) Bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya

c. Indikator Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, indikator standar akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1) PSAP Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun secara terstruktur untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Penyajian laporan keuangan adalah menerapkan basis akrual dan basis kas untuk mengakui transaksi/peristiwa yang terjadi.

2) PSAP Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang. Penyajian laporan realisasi anggaran adalah menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran menggunakan akuntansi berbasis akrual dan mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto.

3) PSAP Nomor 03 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transtoris. Penyajian laporan arus kas adalah menyusun dan menyajikan laporan

arus kas sesuai dengan SAP dan menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi.

4) PSAP Nomor 04 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penyajian catatan atas laporan keuangan adalah menyajikan informasi secara lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.

5) PSAP Nomor 05 Akuntansi Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengakuan akuntansi persediaan adalah mengakui dan mencatat persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi.

6) PSAP Nomor 06 Akuntansi Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aktiva dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu sebagai berikut :

- a) Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengeluaran untuk investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengakuan akuntansi investasi adalah mengakui kas yang telah dikeluarkan sebagai investasi setelah manfaat ekonomi potensi di masa yang akan datang dapat diperoleh dan nilai perolehan investasi dapat diukur.

7) PSAP Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap

Akuntansi aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria berwujud, mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, biaya pemerolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau digunakan dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan akuntansi aset tetap adalah mencatat/menilai aset tetap sebesar biaya perolehannya dan mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas.

8) PSAP Nomor 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lain yang proses pemerolehannya/pembangunannya membutuhkan waktu tertentu, dan belum selesai. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis masa yang akan datang berkaitan dengan aktiva tersebut akan diperoleh.
- b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
- c) Aktiva tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Perlakuan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan adalah mengungkapkan informasi konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi dan memindahkan konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap yang bersangkutan.

9) PSAP Nomor 09 Akuntansi Kewajiban

Suatu kewajiban yang diakui besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan

kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Perlakuan akuntansi kewajiban adalah mencatat kewajiban sebesar nilai nominal dan mengakui kewajiban pada saat kewajiban timbul.

10) PSAP Nomor 10 Koreksi Kesalahan

Koreksi adalah tindakan pembetulan agar pos-pos yang tersaji sesuai dengan seharusnya. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan, pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Perlakuan koreksi kesalahan adalah mengoreksi kesalahan melalui pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan berdasarkan SAP.

11) PSAP Nomor 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan Keuangan Konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAI, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan konsolidasi pada pemerintah daerah mencakup laporan keuangan dari semua entitas akuntansi.

12) PSAP Nomor 12 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang mencakup dalam Laporan operasional adalah pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa. Penyajian laporan operasional adalah menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah.

4. Sistem Pengendalian Internal

a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pada Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, maka dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

c. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, indikator sistem pengendalian intern pemerintah adalah sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a) Penegakan integritas dan nilai etika
- b) Komitmen terhadap kompetensi
- c) Kepemimpinan yang kondusif
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Lingkungan pengendalian pada sistem pengendalian internal dilakukan dengan menerapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) secara tertulis.

2) Penilaian Resiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan:

- a) Tujuan instansi pemerintah
- b) Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c) Identifikasi resiko
- d) Analisis resiko
- e) Mengelola resiko selama perubahan

Penilaian resiko pada sistem pengendalian internal dilakukan dengan menerapkan penentuan batas dan penentuan toleransi terhadap penilaian resiko.

3) Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah

- b) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko
- c) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah
- d) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
- e) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis
- f) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan pengendalian pada sistem pengendalian internal dilakukan dengan menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko kegiatan pengendalian.

4) Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, maka pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasi secara terus menerus.
- c) Mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem komunikasi secara terus menerus.

Informasi dan komunikasi pada pengendalian internal dilakukan dengan menerapkan sistem informasi untuk melaksanakan tanggungjawab

5) Pemantauan Pengendalian Intern

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Internal. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui:

a) Pemantauan berkelanjutan

Diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas

b) Evaluasi terpisah

Diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reuiu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern

c) Penyelesaian audit/tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya

Harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya yang ditetapkan.

Pemantauan pengendalian intern dilakukan dengan melaksanakan sistem akuntansi yang memungkinkan audit dan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan.

B. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian dengan topik yang hampir sama telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Tabel 2.1

Kajian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	T. Asri Yunita	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem	Variabel Independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2015 di SKPD Kota Dumai,	1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

		Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	(X ₁), Sistem Pengendalian Internal (X ₂), dan Kompetensi Staf Akuntansi (X ₃) Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 di BPKAD Provinsi Sumatera Utara	Pemerintah Daerah Kota Dumai 2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai. 3. Kompetensi Staf Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
2.	Ade Saputra	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X ₁), Sistem Pengendalian Intern (X ₂), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₃) Variabel Dependen:	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2015 di SKPD Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 di BPKAD Provinsi Sumatera Utara	1. Penerapan Standar Akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 2. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 3. Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

			Kualitas Laporan Keuangan (Y)		
3.	Arlia Sari Artana	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X_1), Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan (X_2), dan Sistem Pengendalian Internal (X_3) Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2016 di Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dengan menggunakan metode penelitian sampel <i>convenience sampling</i> sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 di BPKAD Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan metode penelitian sampel <i>purposive sampling</i> , serta perbedaan pada variabel independen penelitian terdahulu yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pemahaman sistem informasi akuntansi	<p>1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>3. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan</p>

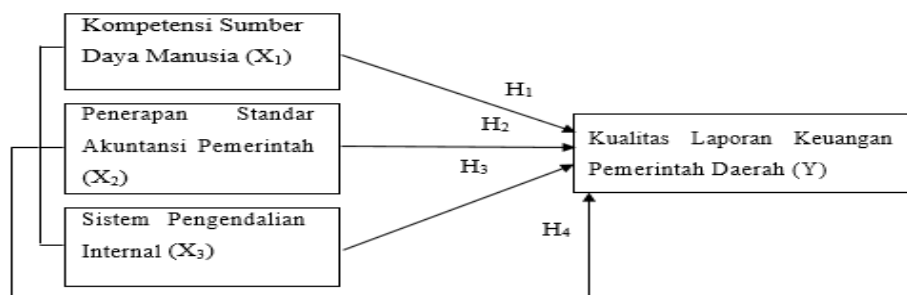
				keuangan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel independen kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah	Pemerintah Daerah. 4. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4.	Putriasri Pujanira	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem	Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_2), dan Sistem	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2017 di pemerintah daerah DIY, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 di BPKAD Provinsi	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY. 2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

		Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Akuntansi Keuangan Daerah (X_3) Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Sumatera Utara, serta perbedaan pada variabel independen terdahulu yaitu sistem akuntansi keuangan daerah sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel independen sistem pengendalian internal	berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY. 3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY. 4. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY.
5.	Putri Syukria Lubis	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem	Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu dilakukan pada	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas

		Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	(X ₁), Sistem Pengendalian Internal (X ₂), Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan (Y)	tahun 2018 di PD. Pasar Kota Medan, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 di BPKAD Provinsi Sumatera Utara, serta perbedaan pada variabel independen terdahulu yaitu tidak terdapat variabel penerapan standar akuntansi pemerintah sedangkan dalam penelitian ini terdapat variabel penerapan SAP	Laporan Keuangan PD. Pasar Kota Medan 2. Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan PD. Pasar Kota Medan
--	--	--	---	---	--

C. Kerangka Teoritis

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Teoritis

Keterangan:

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sejalan dengan otonomi pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat kepada pemerintahan daerah semakin meningkat. Pemerintahan harus dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai salah satu tanggung jawab *good governance* pemerintah harus menyediakan informasi bagi penyedia dana dan pemakai lain. Guna memenuhi tanggung jawab ini dibutuhkan sumber daya manusia dalam penyusunannya. Sumber daya manusia akan berperan aktif dalam proses pelaporan informasi keuangan dari proses awal hingga akhir sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara keseluruhan pada tahun 2015 mengharuskan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman yang berlaku dalam rangka menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan akan berkualitas apabila sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sistem Pengendalian Internal memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan melakukan proses yang integral pada tindakan dan proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sehingga kualitas laporan keuangan dapat memenuhi tanggungjawab pelaporan laporan keuangan.

4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengelola dan melaporkan penggunaan dana yang telah dilakukan secara sistematis pada suatu periode pelaporan. Pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam bidang akuntansi. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah juga penting dilakukan dalam menyusun laporan keuangan. Pemerintah juga harus menyampaikan pertanggungjawaban laporan keuangan tersebut secara baik dan benar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

D. Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya.²⁶ Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir di atas dapat ditarik hipotesa penelitian sebagai berikut:

Ha₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara

H₀₁ : Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Ha₂ : Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara

H₀₂ : Penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara

²⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 56.

Ha₃ : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara

H0₃ : Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Ha₄ : Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap laporan keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara

H0₄ : Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal secara simultan tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Berdasarkan eksplanasi penelitian (penelitian yang mengkaji keterkaitan sebab akibat antara dua fenomena atau lebih), penelitian ini berbentuk penelitian asosiatif dengan tipe kausalitas yaitu penelitian yang menjelaskan pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor BPKAD Provinsi Sumatera Utara yang berada di Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 30 Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

Kegiatan	Desember (2019)				Januari (2020)				Februari (2020)				Maret (2020)			
Perencanaan Penelitian																
Penyusunan Proposal																
Penelitian Lapangan																
Pengolahan Data																
Penyusunan Skripsi																

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan.²⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 123 pegawai.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut.²⁸ Pengambilan sampel ini dilakukan secara *non probability sampling*, yaitu dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel bertujuan dimana teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau disebut juga penarikan sampel bertujuan.²⁹ Berdasarkan populasi diatas, kriteria sampel dalam penelitian ini adalah para pegawai yang terlibat dalam bidang pembuatan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sampel berjumlah 60 orang.

Tabel 3.2

**Jumlah Pegawai yang Terlibat dalam Pembuatan Laporan Keuangan
BPKAD Provinsi Sumatera Utara**

No	Nama Bidang	Jumlah Pegawai
1.	Bidang Akuntansi	13
2.	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	23
3.	Bidang Pengelolaan Anggaran	24
Total		60

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Utara

²⁷ Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 105.

²⁸ Ibid., h. 106.

²⁹ Ibid., h.115.

D. Data Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini meliputi data jumlah karyawan dan tabulasi hasil kuisisioner di BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

2. Sumber Data

Sumber pengumpulan data dilakukan guna memperoleh data yang obyektif dan lengkap sesuai dengan permasalahan yang diambil. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku pustaka untuk dijadikan referensi agar diperoleh pengetahuan tentang yang diteliti, sehingga dapat memecahkan masalah penelitian.

b. Metode Kuisisioner

Metode ini sebagai pendukung untuk menyempurnakan data yang berasal dari metode dokumentasi sehingga sesuai dengan tujuan peneliti.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel menjelaskan definisi yang dinyatakan dalam bentuk istilah yang diuji secara spesifik dengan pengukuran kriteria. Penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan dua variabel independen. Variabel ini diukur menggunakan instrumen kuisisioner dengan skala likert 1 sampai 5, di mana responden diminta pendapatnya dari setiap pernyataan mulai dari tidak setuju sampai sangat setuju, dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)	1. Kompetensi di Bidang Keuangan	Ordinal
	2. Pendidikan dan Pelatihan	Ordinal
	3. Pengalaman di Bidang Keuangan	Ordinal
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_2)	1. Penyajian Laporan Keuangan	Ordinal
	2. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran	Ordinal
	3. Penyajian Laporan Arus Kas	Ordinal
	4. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan	Ordinal
	5. Pengakuan Persediaan	Ordinal
	6. Pengakuan Investasi	Ordinal
	7. Pengakuan Aset Tetap	Ordinal
	8. Perlakuan Akuntansi Konstruksi	Ordinal
	9. Perlakuan Akuntansi Kewajiban	Ordinal
	10. Perlakuan Koreksi Kesalahan	Ordinal
	11. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi	Ordinal
	12. Penyajian Laporan Operasional	Ordinal
Sistem Pengendalian Internal (X_3)	1. Lingkungan Pengendalian	Ordinal
	2. Penilaian Resiko	Ordinal
	3. Kegiatan Pengendalian	Ordinal
	4. Informasi dan Komunikasi	Ordinal
	5. Pemantauan Pengendalian Internal	Ordinal
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1. Relevan	Ordinal
	2. Andal	Ordinal
	3. Dapat dibandingkan	Ordinal
	4. Dapat dipahami	Ordinal

Sumber: Diolah dari berbagai referensi

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Prosedur pengumpulan data dapat juga diartikan sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan tanggungjawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan.³⁰ Kuisisioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden atau meminta bantuan salah satu pegawai di bagian akuntansi. Pernyataan-pernyataan dalam kuisisioner dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan variabel yang diukur. Pengukuran instrumen menggunakan skala likert, dimana berisi pernyataan yang sistematis untuk menunjukkan sikap seseorang terhadap pernyataan itu. Adapun yang dipakai sebagai kuisisioner data angket dengan menggunakan 5 (lima) pilihan yaitu: sangat setuju (SS), setuju (S), Cukup Setuju (CS), Tidak setuju (TS), dan Sangat tidak setuju (STS). Setiap pilihan akan diberikan skor atau bobot nilai yang berbeda seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Skor/Bobot Penilaian Menggunakan Skala Likert

Nomor	Keterangan	Skor/Bobot
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Cukup Setuju (CS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

³⁰ Ibid., h. 124.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.³¹ Teknik analisis data adalah sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif lebih berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data, serta panyajian hasil peringkasan tersebut.³²

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bilvariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut:³³

- 1) Jika r hitung positif dan r hitung $>$ r table maka butir pertanyaan tersebut valid
- 2) Jika r hitung negatif dan r hitung $<$ r table maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

³¹ Azhari Akmal Tarigan, et. al., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La Tansa Press, 2011), h. 99.

³² Singgih Santoso, *SPSS Mengolah Data Statistik secara Profesional*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 1999), h. 68.

³³ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenegoro Semarang, 2018), h. 51.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula.³⁴ Teknik pengukuran reliabilitas menggunakan teknik alpha cronbach untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian reliabel atau tidak, bila jawaban yang diberikan responden berbentuk skala. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas 0,60.³⁵

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik untuk menguji suatu model yang termasuk layak atau tidak layak digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.³⁶

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan mengacu pada *Variance Inflation Factory* (VIF) dimana nilai < 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1.

³⁴ Syofiyani Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 173.

³⁵ Ibid., h. 175.

³⁶ Imam Ghozali, Op.Cit., h. 161.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear berganda kesalahan pengganggu (e) mempunyai varians yang sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi heterokedastisitas varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Heterokedastisitas dideteksi dengan uji *Gletsjer* yaitu dengan melakukan regresi antara nilai residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen model regresi yang diajukan, dan untuk menentukan persamaan regresi bebas hetero maka hasil regresi tersebut harus tidak signifikan. Hasil uji *Gletsjer* menunjukkan bahwa variabel penelitian ini bebas heterokedastisitas dibuktikan dengan tidak terdapatnya variabel bebas yang signifikan pada tingkat 5%.³⁷

4. Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linear berganda. Metode regresi linear berganda berguna bagi para pengguna alat untuk dapat melihat variabel yang bersifat kausal.³⁸ Analisis regresi linear berganda adalah pengembangan analisis regresi sederhana terhadap aplikasi yang terdiri dari dua atau lebih variabel independen untuk menduga nilai variabel dependen. Analisis linear berganda dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_2), dan Sistem Pengendalian Internal (X_3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) pada penelitian ini digunakan model regresi linear berganda. Rumusnya adalah sebagai:

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat (untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua

³⁷ Arfan Ikhsan, Op.Cit., h. 188.

³⁸ Muhammad Teguh, *Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 103.

atau lebih variabel bebas X_1, X_2, \dots, X_n terhadap suatu variabel terikat Y). Model analisis linear berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas laporan keuangan

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia (X_1)

β_2 = Koefisien regresi penerapan standar akuntansi pemerintah (X_2)

β_3 = Koefisien regresi sistem pengendalian internal (X_3)

X_1 = Variabel kompetensi sumber daya manusia

X_2 = Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah

X_3 = Variabel regresi sistem pengendalian internal

e = Standart Error

5. Uji Hipotesis Penelitian

a. Uji t (*t-test*)

Uji statistik t adalah uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol, atau: $H_0 : \beta_i = 0$. Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.³⁹ Hipotesis alternatifnya (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_a : \beta_i \neq 0$$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Quick look, yaitu bila jumlah *degree of freedom* adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang menyatakan $\beta_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan

³⁹ Arfan Ikhsan, Op.Cit., h. 199.

kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

- 2) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel, yaitu apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Dalam pengujian ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ untuk $\alpha = 5\%$ H_0 diterima

Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ untuk $\alpha = 5\%$ H_0 ditolak

b. Uji F (*F test*)

Uji statistik F adalah uji yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:

$$H_a : b_1 \neq 0 \text{ atau } b_2 \neq 0 \text{ atau } \dots \text{ atau } b_k \neq 0$$

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Quick look, yaitu bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 yang menyatakan $b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$ dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen.

- 2) Membandingkan nilai statistik F hitung dengan nilai F tabel, yaitu bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

Dalam pengujian ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ untuk $\alpha = 5\%$ H_0 diterima

Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ untuk $\alpha = 5\%$ H_0 ditolak

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtutan waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

Nilai R gunanya untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel independen (x) secara simultan terhadap variabel dependen (y). Nilai korelasi bisa bernotasi negatif maupun positif, notasi ini mengindikasikan bentuk atau arah hubungan yang terjadi. Sedangkan nilai R square (R^2) gunanya untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen (x) secara serempak didalam menjelaskan variabel dependen (y)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouvernement van Sumatera* dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur berkedudukan dikota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administrative yang disebut Keresidenan, yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I) No.10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing - masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I Nomor 22 /Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara diiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang No.5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara.

Dengan Undang–Undang R.I No.24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga

wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh. Motto Daerah, adalah Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya.

Sementara BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) Provinsi Sumatera Utara adalah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang baru dibentuk berdasarkan tindak lanjut Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan pergantian nama yang baru di kantor Gubernur Sumatera Utara. Sebelum berganti nama menjadi BPKAD adalah dulunya dinamakan Biro Keuangan. Sedangkan ASN (Aparatur Sipil Negara) terdiri dari eks Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setda Provinsi Sumatera Utara dan sebagian berada di Biro Umum.

2. Visi dan Misi BPKAD Provinsi Sumatera Utara

a. Visi BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Menjadikan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai pembantu pengelola barang milik daerah yang transparan dan berdaya saing dengan meningkatkan sumber daya aparatur yang mempunyai pengetahuan pengelolaan barang milik daerah yang berbasis teknologi sehingga terpenuhinya pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas.

b. Misi BPKAD Provinsi Sumatera Utara

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai dengan perkembangan teknologi.
- 2) Bertambahnya sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dalam pengelolaan barang milik daerah yang berbasis teknologi sehingga terciptanya tertib pengelolaan barang milik daerah untuk menuju wajar tanpa pengecualian.
- 3) Meningkatkan kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan dukungan kualitas dan kuantitas barang milik daerah.

3. Tugas Pokok BPKAD Provinsi Sumatera Utara

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dipimpin seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok antara lain: "Merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah".

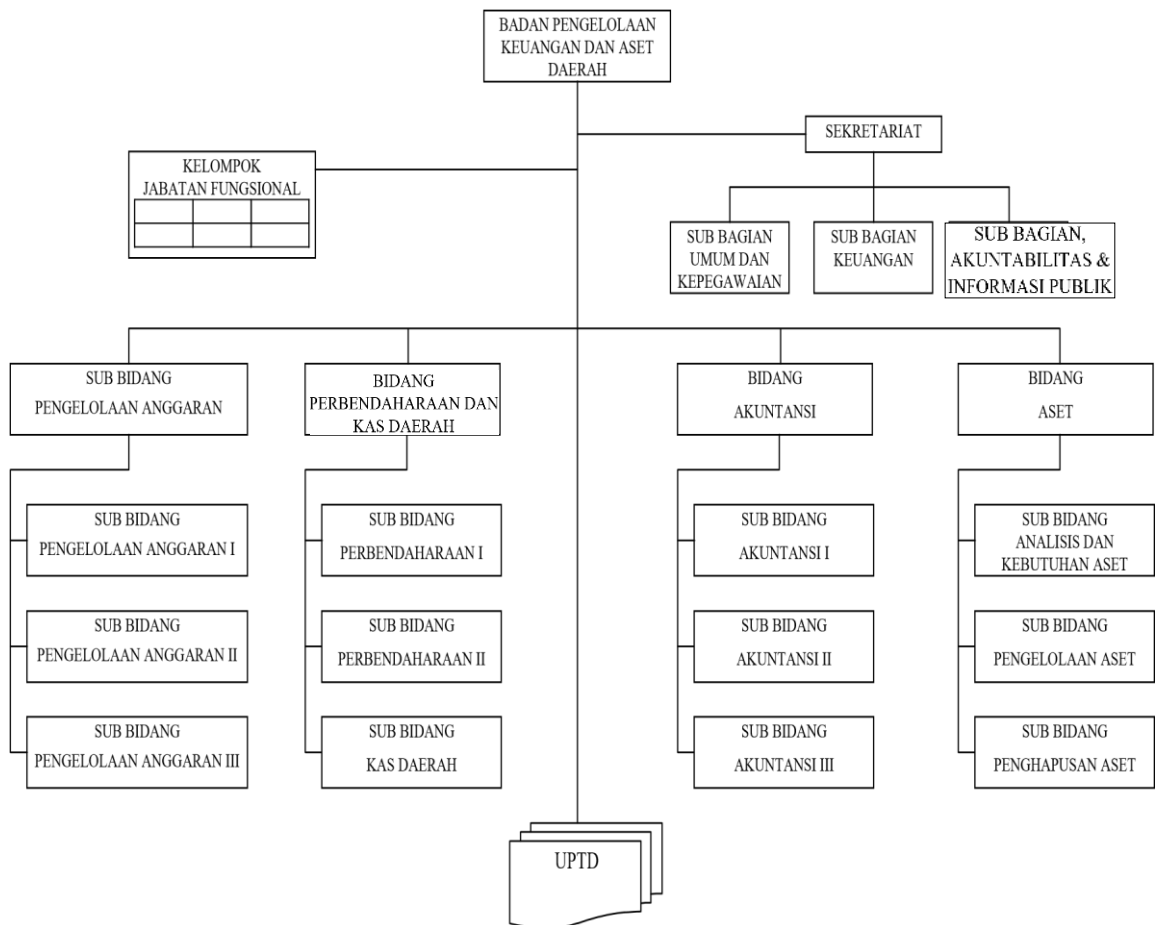
b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Menyelenggarakan Fungsi

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 2) Penyusunan dan perumusan rencana kerja di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 3) Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 4) Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Merencanakan, menginvestarisir dan mengelola aset daerah.

4. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

a. Struktur Organisasi

Setiap instansi perkantoran pasti memiliki struktur organisasi, struktur organisasi sangat penting di dalam perkantoran karena berfungsi sebagai landasan bagi seluruh fungsi yang ada dalam organisasi untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap fungsi. Struktur organisasi dapat dilihat pada Bagan dibawah ini.



Gambar 4.1

Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Utara

b. Pembagian Tugas

1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas:

- a. Memimpin, merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan Kepala Daerah.
- b. Menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- c. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu ditetapkan.
- d. Mengendalikan kegiatan-kegiatan pada Badan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program-program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang-bidang, UPTD pada Badan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.
- f. Melakukan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang, UPTD dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
- g. Mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Badan kepada Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala UPTD berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien dan efektif dan tepat waktu.
- h. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
- i. Menyenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efisien dan efektif.
- j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang badan pengelolaan keuangan dan aset daerah baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

- k. Melaporkan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan bendahara umum daerah yang diberikan oleh Gubernur.

2) Sekretariat BPKAD, kepala BPKAD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas sekretariat BPKAD:

- a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf di lingkungan Sekretariat.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan kesekretariatan.
- c. Menyelenggarakan penyiapan penyusunan rencana dan program kegiatan dalam penyelenggaraan urusan kesekretariatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menyelenggarakan pengkajian dan analisa pengelolaan Sekretariat.
- e. Menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi Sekretariat, dan lain sebagainya.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPKAD Provsu, dibantu dan memimpin 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- 1. Menyusun rencana kerja sub bagian.
- 2. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.
- 3. Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana.

b) Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- 1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara.

2. Melakukan verifikasi SPP
3. Melaksanakan akuntansi SKPD

c) Kepala Sub Bagian, Akuntabilitas dan Informasi Publik, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program.
2. Melaksanakan rencana penataan kelembagaan Badan sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran tugas Badan.
3. Melaksanakan penataan kearsipan sub bagian untuk tertib administrasi.

3) Bidang Pengelolaan Anggaran, mempunyai tugas:

- a. Menyusun konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
- b. Melakukan koordinasi penyiapan konsep kebijakan pinjaman dan piutang daerah.
- c. Menyajikan informasi anggaran daerah.
- d. Melaksanakan evaluasi Rancangan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
- e. Melaksanakan tugas-tugas administrasi perkantoran.

Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dibantu dan memimpin 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:

a) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I, mempunyai tugas:

1. Membantu penyusunan konsep kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk anggaran pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.
2. Menyiapkan dan mengadministrasikan surat masuk dan surat keluar.
3. Melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

b) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II, mempunyai tugas:

1. Membantu penyusunan konsep kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk anggaran Belanja Tidak Langsung.
2. Melaksanakan verifikasi RKA-SKPD/SKPD sesuai kompetensinya

3. Melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

c) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran III, mempunyai tugas:

1. Membantu menyusun konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan
2. APBD untuk anggaran Belanja Langsung.
3. Melaksanakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Perbendaharaan Kas Daerah, mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- b. Menyelenggarakan penertiban Surat Perintah Pencairan Dana.
- c. Menyelenggarakan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah.
- d. Menyelenggarakan Pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- e. Menyelenggarakan Pembuatan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu dan memimpin 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

a) Kepala Sub Bidang Kas Daerah, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian data di bidang Kas Daerah.
2. Melaksanakan rekonsiliasi Kas Harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
3. Melaksanakan Penyimpanan surat-surat berharga.

b) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan analisis anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan belanja modal.

2. Melaksanakan penyiapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
3. Melaksanakan penyiapan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji.

c) Kepala Sub bidang Perbendaharaan II, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pembuatan laporan realisasi gaji PNS setiap bulan.
2. Melaksanakan penelitian kebenaran Surat Permintaan pembayaran dan Surat Perintah Membayar dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan pembebanan kode rekening dan DPA.
3. Melaksanakan pembuatan laporan realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan SP2D.

5) Bidang Akuntansi, mempunyai tugas:

- a. Menyusun konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- b. Menyajikan Informasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- c. Menyelenggarakan pembinaan tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- d. Menyelenggarakan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugasnya dibantu dan memimpin 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

a) Kepala Sub Bidang Akuntansi I, mempunyai tugas:

1. Menerima dan menyelenggarakan rekonsiliasi Laporan Operasional (LO) SKPD sesuai standar yang ditetapkan setiap bulannya.
2. Menyelenggarakan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
3. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD dan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Kepala Sub Bidang Akuntansi II, mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan sinkronisasi data dan laporan - laporan Bendahara penerimaan SKPD.
2. Menyelenggarakan rekonsiliasi data realisasi pendapatan dengan SKPD setiap bulannya.
3. Menerima dan menyelenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD sesuai standar yang ditetapkan setiap bulannya.

c) Kepala Sub Bidang Akuntansi III, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
2. Menyelenggarakan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Sumatera Utara setiap bulan, triwulan, semester dan prognosis enam bulan berikutnya sesuai standar yang ditetapkan.
3. Menyelenggarakan penyusunan Laporan Operasional (LO) Provsu setiap triwulan dan semester sesuai standar yang ditetapkan.

6) Bidang Aset, mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar dalam penyelenggaraan urusan bidang aset.
- b. Menyelenggarakan penyusunan peraturan pengolahan barang milik daerah dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan bidang aset.
- c. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan kebutuhan dan program kegiatan di bidang aset sesuai peraturan perundang - undangan.
- d. Menyelenggarakan koordinasi, konsultasi pengelolaan Provinsi, Kabupaten/Kota dan BUMD Provinsi, sesuai ketentuan perundang-undangan.

- e. Menyelenggarakan penatausahaan, penggolongan, kodefikasi, inventarisasi dan identifikasi barang daerah/aset, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Aset dalam melaksanakan tugasnya dibantu dan memimpin

3 (tiga) Sub Bidang yaitu:

a) Sub Bidang Analisis dan Kebutuhan Aset, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pembinaan bimbingan dan arahan kepada Staf pada lingkungan Sub Bagian/ Seksi Analisa Kebutuhan.
2. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam menyelenggarakan urusan analisa kebutuhan.
3. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, dan penyajian bahan/data perencanaan program dan kegiatan urusan analisa kebutuhan sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan.
4. Menyelenggarakan, menyusun, meneliti, menyiapkan dan menghimpun Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) pengadaan dan Rencana Kebutuhan BMD Pemeliharaan (RKBMD) yang disusun berdasarkan standar harga (besaran harga), standar kebutuhan (satuan jumlah barang), dan standar barang (spesifikasi) untuk satu tahun anggaran dari masing-masing SKPD.
5. Menyelenggarakan, menyusun (tim) penyusunan standar harga, standar kebutuhan, dan standar barang bersama dinas terkait dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur Sumatera Utara.
6. Menyelenggarakan meneliti pengalihan status penggunaan BMD kepada pengguna barang lainnya dan memproses persetujuan Gubernur.
7. Menyelenggarakan, menyusun dan menyiapkan Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKD-BMD) pengadaan dan RDKPBMD pemeliharaan menurut jenis barang, pekerjaan, banyak atau volume, perkiraan waktu dan biaya serta pelaksanaannya yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD masing-masing SKPD.
8. Menyelenggarakan meneliti dan permohonan persetujuan tentang penggunaan sementara BMD kepada pengguna barang lainnya dalam

jangka waktu tertentu tanpa mengubah status penggunaan barang yang ada.

9. Menyelenggarakan, meneliti rencana tahunan pengadaan dan pemeliharaan setelah APBD ditetapkan yang dituangkan/tercermin dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) masing - masing SKPD yang harus sesuai dengan RKA masing-masing SKPD.
10. Menyelenggarakan, meneliti usulan penggunaan barang untuk ditetapkan Gubernur, penetapan status penggunaan barang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tupoksi SKPD pengusul.
11. Menyelenggarakan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) SKPD yang harus sesuai dengan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan yang telah ditetapkan pengelolaan barang.
12. Melaksanakan persiapan penyusunan prosedur pengajian perencanaan kebutuhan barang dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
13. Penyusunan penetapan standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.
14. Melaksanakan identifikasi penelahan dan review atas data/bahan usulan RKBMD dan RKBMD yang diajukan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
15. Melaksanakan penyusunan rekapitulasi/daftar RKBMD dan RKPBMMD untuk ditetapkan menjadi keputusan Gubernur Sumatera Utara.

b) Sub Bidang Pengelolaan Aset, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Staf pada lingkungan Sub Bagian/Seksi Pengelolaan Aset.
2. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan aset sesuai ketentuan dan peraturan perundang - undangan.
3. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan penyajian data BMD bergerak dan tidak bergerak berupa tanah, peralatan

kantor/mesin, gedung dan bangunan, jalan jembatan jaringan, aset pengerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi melakukan catatan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola, pengguna/kuasa pengguna barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang ke dalam Kartu Inventaris Barang (KB A s/d F) dan melakukan pembuatan KR (Kartu Inventaris Ruangan).
5. Menyelenggarakan pembinaan koordinasi dan melakukan inventarisasi BMD secara lengkap dan akurat meliputi lokasi, jenis, merk, tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal perolehan, dan kondisi barang.
6. Menyelenggarakan pembinaan koordinasi dan menghimpun dan merekapitulasi laporan penggunaan barang semesteran, tahunan dari 5 (lima) tahunan.
7. Menyelenggarakan pembinaan koordinasi, penyusunan dan merekapitulasi laporan semesteran dan tahunan sebagai bahan pendukung penyusunan neraca daerah.
8. Menyelenggarakan permohonan koordinasi dan monitoring penerimaan semua barang bergerak, tidak bergerak dari hasil pengadaan oleh pengurus barang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
9. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan monitoring penyimpanan barang oleh pengurus barang dalam rangka pengurusan penyelenggaraan dan penatausahaan barang persediaan dan melakukan pemeriksaan pembukuan dan pencatatan serta stock opname secara berkala ataupun terhadap barang persediaan yang ada.
10. Menyelenggarakan pembinaan koordinasi dan monitoring penyaluran barang milik daerah ke unit pemakai dan menyelenggarakan tertib administrasi penyaluran dan membuat laporan realisasi penyaluran persediaan BMD.

11. Menyelenggarakan pembinaan koordinasi dan melakukan inventarisasi BMD, kodefikasi dan verifikasi fisik dan administrasi sesuai ketentuan dan aturan yang ditetapkan.
12. Melaksanakan penyusunan kegiatan sensus Barang Milik Daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
13. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BMD serta mengelola barang persediaan.
14. Melaksanakan sosialisasi bimbingan teknis, koordinasi, konsultasi dan asistensi dalam rangka penatausahaan BMD.
15. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pengelolaan aset di lingkungan BUMD.

c) Sub Bidang Penghapusan, mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi meneliti dan melakukan proses pemindahtanganan BMD (penjualan, ruislag, hibah dan atau penyertaan modal) atas usulan SKPD sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi meneliti dan melakukan proses pemusnahan terhadap BMD (Barang Milik Daerah) yang sudah tidak dapat dipindahtanganan atas usulan SKPD sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, meneliti dan melakukan proses penghapusan BMD sebagai tindak lanjut pemindah tanganan, sebagai tindak lanjut pemindahtanganan, pemusnahan, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi dan melakukan penilaian dan atau penaksiran harga BMD dengan tim/ panitia dalam rangka pemindahtanganan pemusnahan dan pemusnahan BMD sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

5. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan penjualan sisa bongkaran BMD dengan SKPD sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
6. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penjualan langsung maupun lelang umum BMD sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada Staf pada lingkungan Sub Bagian/Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan.
8. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka pengamanan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai penghapusan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan.
9. Melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan dokumen kendaraan dinas dan penarikan kendaraan dinas yang akan diproses pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi persertifikasian tanah dari pemasangan plank, serta penertiban BMD dengan SKPD dan instansi terkait.
11. Melaksanakan koordinasi, inventarisasi, dan identifikasi data perencanaan pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan barang bergerak sesuai keputusan dan peraturan yang berlaku.
12. Melaksanakan persiapan dan penyelenggaraan penjualan Barang Milik Daerah (penjualan langsung atau lelang umum).
13. Melaksanakan hubungan kerjasama dalam rangka penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan dengan instansi terkait.
14. Melaksanakan pengkajian, penelitian dan memberikan masukan, saran, dan pendapat kepada atasan/pimpinan dalam rangka pengamanan dan penghapusan BMD
15. Melaksanakan rapat-rapat internal dan eksternal dalam rangka urusan pengelolaan aset daerah.

7) UPTD Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Tidak Bergerak, mempunyai tugas:

Tugas pokok UPTD Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Tidak Bergerak adalah "Membantu Kepala Badan untuk urusan pemanfaatan dan pengamanan barang tidak bergerak". Adapun fungsi Kepala UPTD Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Tidak Bergerak adalah:

- a. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi kebijakan ketatausahaan dan teknis pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah.
- b. Menyelenggarakan pelayanan informasi dan komunikasi pengelolaan barang milik daerah serta pengaturan pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah.
- c. Melaksanakan pembinaan bukti kepemilikan barang milik daerah serupa sertifikat.
- d. Melaksanakan penyusunan tata tertib pengendalian, pengawasan penyimpanan barang pada gudang penyimpanan.

Kepala UPTD Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Tidak Bergerak menjalankan tugas:

1. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring evaluasi dan meneliti pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan bangunan yang masih digunakan pengguna barang dan selain tanah atau bangunan dengan persetujuan pengelola.
2. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi pada SKPD dalam rangka pemasangan tanda barang letak tanah atau pemagaran, pengurusan bukti kepemilikan (Sertifikat, BPKB) dan pengurusan tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama Pemerintah Daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Menyelenggarakan pembinaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi pengendalian urusan ketatausahaan atau administrasi, dokumentasi pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah.

4. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan meneliti pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, KSSP, BGS/BSG dan KSPI kepada pihak ketiga dengan tidak merubah status kepemilikannya.

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian, kuesioner yang dibagikan sejumlah 60 lembar eksemplar atau 100% dan kembali dalam jumlah 50 atau 83,3%. Adapun gambaran karakteristik data kuesioner dan deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	60	100%
2	Kuesioner yang kembali	50	83,3%
3	Kuesioner yang tidak kembali	10	16,7%
4	Kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0%

Sumber: Data primer yang diolah

1. Uji Deskriptif

a. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 50. Deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	30	60,0	60,0	60,0
Perempuan	20	40,0	40,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 50 responden sebanyak 30 orang (60%) berjenis kelamin laki-laki, dan 20 orang (40%) berjenis kelamin perempuan.

b. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 50. Deskriptif responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 30-34	5	10,0	10,0	10,0
35-39	12	24,0	24,0	34,0
40-44	10	20,0	20,0	54,0
45-49	8	16,0	16,0	70,0
>50	15	30,0	30,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 50 responden sebanyak 5 orang (10%) yang berusia 30-34 tahun, 12 orang (24%) berusia 35-39 tahun, 10 orang (20%) berusia 40-44, 8 orang (16%) berusia 45-49 tahun, dan 15 orang (30%) berusia 50 tahun keatas.

c. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 50. Deskriptif responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SMA	14	28,0	28,0	28,0
D3	3	6,0	6,0	34,0
Valid S1	27	54,0	54,0	88,0
S2	6	12,0	12,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 50 responden sebanyak 14 orang (28%) berijazah SMA, 3 orang (6%) berijazah D3, 27 orang (54%) berijazah S1, dan 6 orang (12%) berijazah S2.

d. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Lama Bekerja

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 50. Deskriptif responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Lama Bekerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
9-13	29	58,0	58,0	58,0
14-18	4	8,0	8,0	66,0
19-23	1	2,0	2,0	68,0
Valid 24-28	5	10,0	10,0	78,0
29-33	8	16,0	16,0	94,0
>34	3	6,0	6,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Sumber : Data Diolah Dengan SPSS

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari 50 responden, sebanyak 29 orang (58%) telah bekerja selama 9-13 tahun, 4 orang (8%) telah bekerja selama 14-18 tahun, 1 orang (2%) telah bekerja selama 19-23 tahun, 5 orang (10%) telah bekerja selama 24-28 tahun, 8 orang (16%) telah bekerja selama 29-33 tahun, dan 3 orang (6%) telah bekerja selama 34 tahun keatas.

e. Analisis Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Berkaitan dengan Pembuatan Laporan Keuangan (X₁)

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 50. Deskriptif responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Kompetensi Sumber Daya
Manusia yang Berkaitan dengan Pembuatan Laporan Keuangan
BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Item Pernyataan	Skor Jawaban Responden										Total	
	SS		S		N		TS		STS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	25	50,0	25	50,0	-	-	-	-	-	-	50	100
2	24	48,0	26	52,0	-	-	-	-	-	-	50	100
3	11	22,0	35	70,0	4	8,0	-	-	-	-	50	100
4	9	18,0	39	78,0	2	4,0	-	-	-	-	50	100
5	10	20,0	38	76,0	2	4,0	-	-	-	-	50	100
6	17	34,0	32	64,0	1	2,0	-	-	-	-	50	100

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Dari tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pernyataan 1, mayoritas responden sebanyak 25 responden (50,0%) menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa sebagai sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan berlatar belakang pendidikan keuangan.
- 2) Pernyataan 2, mayoritas responden sebanyak 26 responden (52,0%) menyatakan setuju bahwa kecakapan manajerial sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan meningkat setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan.
- 3) Pernyataan 3, mayoritas responden sebanyak 35 responden (70,0%) menyatakan setuju bahwa pelayanan dari sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan meningkat setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan.
- 4) Pernyataan 4, mayoritas responden sebanyak 39 responden (78,0%) menyatakan setuju bahwa sumber daya manusia yang berkaitan dengan

pembuatan laporan keuangan telah memahami teori-teori yang berkaitan dengan keuangan.

- 5) Pernyataan 5, mayoritas responden sebanyak 38 responden (76,0%) menyatakan setuju bahwa sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan telah memahami aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 6) Pernyataan 6, mayoritas responden sebanyak 32 responden (64,0%) menyatakan sangat setuju bahwa sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil laporan keuangan.

f. Analisis Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X₂)

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 50. Deskriptif responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7

Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Item Pernyataan	Skor Jawaban Responden										Total	
	SS		S		N		TS		STS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	21	42,0	27	54,0	2	4,0	-	-	-	-	50	100
2	27	54,0	23	46,0	-	-	-	-	-	-	50	100
3	-	-	49	98,0	1	2,0	-	-	-	-	50	100
4	29	58,0	20	40,0	1	2,0	-	-	-	-	50	100
5	30	60,0	20	40,0	-	-	-	-	-	-	50	100
6	3	6,0	47	94,0	-	-	-	-	-	-	50	100

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Dari tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pernyataan 1, mayoritas responden sebanyak 27 responden (54,0%) menyatakan setuju bahwa dalam penerapan standar akuntansi pemerintah telah menerapkan basis akrual dan basis kas untuk mengakui transaksi/peristiwa yang terjadi serta telah menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran menggunakan akuntansi berbasis akrual dan mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto.
- 2) Pernyataan 2, mayoritas responden sebanyak 27 responden (54,0%) menyatakan sangat setuju bahwa dalam penerapan standar akuntansi pemerintah telah menerapkan penyusunan dan penyajian LAK sesuai dengan SAP dan menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi serta telah menyajikan informasi secara lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.
- 3) Pernyataan 3, mayoritas responden sebanyak 49 responden (98,0%) menyatakan setuju bahwa dalam penerapan standar akuntansi pemerintah telah menerapkan pengakuan dan pencatatan persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi serta telah mengakui kas yang telah dikeluarkan sebagai investasi setelah manfaat ekonomi potensi di masa yang akan datang dapat diperoleh dan nilai perolehan investasi dapat diukur.
- 4) Pernyataan 4, mayoritas responden sebanyak 29 responden (58,0%) menyatakan sangat setuju bahwa dalam penerapan standar akuntansi pemerintah telah menerapkan pencatatan dan penilaian aset tetap sebesar biaya perolehannya dan mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas serta telah mengungkapkan informasi konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi dan memindahkan konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap yang bersangkutan.
- 5) Pernyataan 5, mayoritas responden sebanyak 30 responden (60,0%) menyatakan sangat setuju bahwa dalam penerapan standar akuntansi pemerintah telah menerapkan pencatatan kewajiban sebesar nilai nominal dan mengakui kewajiban pada saat kewajiban timbul serta telah mengoreksi

kesalahan melalui pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan berdasarkan SAP.

- 6) Pernyataan 6, mayoritas responden sebanyak 47 responden (54,0%) menyatakan setuju bahwa dalam penerapan standar akuntansi pemerintah telah menerapkan laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan yang mencakup laporan keuangan dari semua entitas akuntansi serta telah menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola pemerintah daerah dalam laporan operasional.

g. Analisis Variabel Sistem Pengendalian Internal (X₃)

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 50. Deskriptif responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8

**Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Sistem Pengendalian Internal
BPKAD Provinsi Sumatera Utara**

Item Pernyataan	Skor Jawaban Responden										Total	
	SS		S		N		TS		STS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	14	28,0	36	72,0	-	-	-	-	-	-	50	100
2	26	52,0	24	48,0	-	-	-	-	-	-	50	100
3	25	50,0	25	50,0	-	-	-	-	-	-	50	100
4	27	54,0	23	46,0	-	-	-	-	-	-	50	100
5	-	-	45	90,0	5	10,0	-	-	-	-	50	100
6	10	20,0	39	78,0	1	2,0	-	-	-	-	50	100

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Dari tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pernyataan 1, mayoritas responden sebanyak 36 responden (72,0%) menyatakan setuju bahwa sebagai sistem pengendalian internal telah menerapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) secara tertulis.
- 2) Pernyataan 2, mayoritas responden sebanyak 26 responden (52,0%) menyatakan sangat setuju bahwa sebagai sistem pengendalian internal telah menerapkan penentuan batas dan penentuan toleransi terhadap penilaian resiko.
- 3) Pernyataan 3, mayoritas responden sebanyak 25 responden (50,0%) menyatakan setuju bahwa sebagai sistem pengendalian internal telah menerapkan pengendalian internal dan manajemen terhadap resiko kegiatan pengendalian.
- 4) Pernyataan 4, mayoritas responden sebanyak 27 responden (54,0%) menyatakan sangat setuju bahwa sebagai sistem pengendalian internal telah menerapkan sistem informasi untuk melaksanakan tanggungjawab.
- 5) Pernyataan 5, mayoritas responden sebanyak 45 responden (90,0%) menyatakan setuju bahwa sebagai sistem pengendalian internal telah melaksanakan sistem akuntansi yang memungkinkan audit.
- 6) Pernyataan 6, mayoritas responden sebanyak 39 responden (78,0%) menyatakan setuju bahwa sebagai sistem pengendalian internal pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi.

h. Analisis Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 50. Deskriptif responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9
Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Kualitas Laporan Keuangan
BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Item Pernyataan	Skor Jawaban Responden										Total	
	SS		S		N		TS		STS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	49	98,0	1	2,0	-	-	-	-	-	-	50	100
2	29	58,0	20	40,0	1	2,0	-	-	-	-	50	100
3	21	42,0	29	58,0	-	-	-	-	-	-	50	100
4	19	38,0	20	40,0	1	2,0	-	-	-	-	50	100
5	17	34,0	32	64,0	1	2,0	-	-	-	-	50	100
6	18	36,0	32	64,0	-	-	-	-	-	-	50	100

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Dari tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pernyataan 1, mayoritas responden sebanyak 49 responden (98,0%) menyatakan sangat setuju bahwa laporan keuangan yang disusun tepat waktu, sesuai pada SAP dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan saat ini dan masa yang akan datang serta telah mengoreksi keputusan masa lalu.
- 2) Pernyataan 2, mayoritas responden sebanyak 29 responden (58,0%) menyatakan sangat setuju bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah jujur, benar menggambarkan transaksi dan peristiwa lainnya, dan memenuhi kebutuhan para pengguna serta tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya dan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.
- 3) Pernyataan 3, mayoritas responden sebanyak 29 responden (58,0%) menyatakan setuju bahwa informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang disusun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

- 4) Pernyataan 4, mayoritas responden sebanyak 20 responden (40,0%) menyatakan setuju bahwa dalam penyusunan laporan keuangan telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun.
- 5) Pernyataan 5, mayoritas responden sebanyak 32 responden (64,0%) menyatakan setuju bahwa laporan keuangan yang disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami
- 6) Pernyataan 6, mayoritas responden sebanyak 32 responden (64,0%) menyatakan setuju bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pengguna

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Angket yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data. Untuk pengujian pengujian validitas angket dilakukan dengan membandingkan r_{tabel} (pearson correlation) dengan r_{hitung} . Nilai r_{tabel} dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$.

1) Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Untuk itu dilakukan uji coba terhadap instrumen kepada 50 orang sampel, dengan menggunakan teknik Pearson Correlation dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing item dengan skor totalnya, dan $r = n - k$, $r = 50 - 2 = 48$ (sebesar 0,278). Adapun hasil uji validitas untuk kompetensi sumber daya manusia (X_1) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.10
Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia

No.	Rhitung	Nilai Rtabel	Status
	Pearson Correlation	N= 50, $\alpha= 5\%$	
1	0,558	0,278	Valid
2	0,437	0,278	Valid
3	0,690	0,278	Valid
4	0,618	0,278	Valid
5	0,652	0,278	Valid
6	0,556	0,278	Valid

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Hasil analisis variabel kompetensi sumber daya manusia menunjukkan adanya 6 butir pernyataan yang diajukan adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pernyataan dapat digunakan karena rhitung > rtabel sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

2) Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Untuk itu dilakukan uji coba terhadap instrumen kepada 50 orang sampel, dengan menggunakan teknik Pearson Correlation dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing item dengan skor totalnya, dan $r = n - k$, $r = 50 - 2 = 48$ (sebesar 0,278). Adapun hasil uji validitas untuk penerapan standar akuntansi pemerintah (X_2) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11
Uji Validitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

No.	Rhitung	Nilai Rtabel	Status
	Pearson Correlation	N= 50, $\alpha= 5\%$	
1	0,685	0,278	Valid
2	0,769	0,278	Valid
3	0,283	0,278	Valid
4	0,360	0,278	Valid
5	0,522	0,278	Valid
6	0,721	0,278	Valid

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Hasil analisis variabel penerapan standar akuntansi pemerintah menunjukkan adanya 6 butir pernyataan yang diajukan adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pernyataan dapat digunakan karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

3) Variabel Sistem Pengendalian Internal

Untuk itu dilakukan uji coba terhadap instrumen kepada 50 orang sampel, dengan menggunakan teknik Pearson Correlation dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing item dengan skor totalnya, dan $r = n - k$, $r = 50 - 2 = 48$ (sebesar 0,278). Adapun hasil uji validitas untuk sistem pengendalian internal (X_3) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12
Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal

No.	Rhitung	Nilai Rtabel	Status
	Pearson Correlation	N= 50, $\alpha= 5\%$	
1	0,570	0,278	Valid
2	0,537	0,278	Valid
3	0,738	0,278	Valid
4	0,514	0,278	Valid
5	0,576	0,278	Valid
6	0,579	0,278	Valid

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Hasil analisis variabel sistem pengendalian internal menunjukkan adanya 6 butir pernyataan yang diajukan adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pernyataan dapat digunakan karena rhitung > rtabel sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

4) Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Untuk itu dilakukan uji coba terhadap instrumen kepada 50 orang sampel, dengan menggunakan teknik Pearson Correlation dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing item dengan skor totalnya, dan $r = n - k$, $r = 50 - 2 = 48$ (sebesar 0,278). Adapun hasil uji validitas untuk kualitas laporan keuangan (Y) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.13
Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan

No.	Rhitung	Nilai Rtabel	Status
	Pearson Correlation	N= 50, $\alpha= 5\%$	
1	0,375	0,278	Valid
2	0,645	0,278	Valid
3	0,651	0,278	Valid
4	0,594	0,278	Valid
5	0,608	0,278	Valid
6	0,625	0,278	Valid

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Hasil analisis variabel kualitas laporan keuangan menunjukkan adanya 6 butir pernyataan yang diajukan adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pernyataan dapat digunakan karena rhitung > rtabel sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

b. Uji Reliabilitas

1) Uji Reliabilitas Kompetensi Sumber Daya Manusia

Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap kompetensi sumber daya manusia (X_1) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Uji Reliabilitas X_1
Reliability Statistics

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.616	6

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Dari tabel di atas diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,616, nilai ini > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa item kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan (X_1) reliabel.

2) Uji Reliabilitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah (X_2) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15

Uji Reliabilitas X_2

Reliability Statistics

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.609	6

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Dari tabel di atas diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,609, nilai ini > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa item kompetensi penerapan standar akuntansi pemerintah (X_2) reliabel.

3) Uji Reliabilitas Sistem Pengendalian Internal

Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap sistem pengendalian internal (X_3) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16

Uji Reliabilitas X_3

Reliability Statistics

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.605	6

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Dari tabel di atas diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,605, nilai ini > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa item sistem pengendalian internal (X₃) reliabel.

4) Uji Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan

Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap variabel dependen adalah:

Tabel 4.17
Uji Reliabilitas Y
Reliability Statistics

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.621	6

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Dari tabel di atas diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,621, nilai ini > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa item kompetensi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) reliabel.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Berikut adalah hasil dari uji normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).

Tabel 4.18
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.82087767
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.049
	Negative	-.066
Kolmogorov-Smirnov Z		.465
Asymp. Sig. (2-tailed)		.982

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Dari tabel 4.18, hasil uji K-S diketahui bahwa nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar $0,982 > 0,05$, jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

2. Uji Multikoleniaritas

Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Adapun hasil uji multikoleniaritas tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.19
Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.835	2.133		1.330	.190		
	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	-.242	.097	-.259	-2.503	.016	.496	2.014
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2)	.776	.132	.739	5.897	.000	.338	2.956
	Sistem Pengendalian Internal (X3)	.353	.136	.338	2.604	.012	.316	3.166

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada tidaknya gejala penyakit heteroskedastisitas dapat dilihat dari besarnya nilai signifikansi, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan tidak ada gejala penyakit heteroskedastisitas. Berikut tabel uji Heteroskedastisitas:

Tabel 4.20
Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.591	1.277		-.463	.646
	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	.077	.058	.271	1.327	.191
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2)	-.033	.079	-.105	-.423	.674
	Sistem Pengendalian Internal (X3)	.005	.081	.015	.060	.952

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Abs_RES. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

D. Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_2), dan Sistem Pengendalian Internal (X_3) terhadap variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,835 - 0,242 X_1 + 0,776X_2 + 0,353X_3 + e$$

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

X1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

X2 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

X3 = Sistem Pengendalian Internal

e = Standart Error

Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Nilai konstan (a) = 2,835 artinya apabila skor variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal sama dengan nol, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah naik sebesar 2,835.
- b. Nilai koefisien regresi Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) sebesar -0,242 artinya apabila variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia meningkat satu maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan mengalami penurunan sebesar -0,242.
- c. Nilai koefisien regresi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_2) sebesar 0,776 artinya apabila Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah meningkat satu maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,776.
- d. Nilai koefisien regresi Sistem Pengendalian Internal (X_3) sebesar 0,353 artinya apabila sistem pengendalian internal meningkat satu maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,091.

E. Uji Hipotesis

1. Uji t (t-test)

Uji statistik t adalah uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.21**Uji T****Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.835	2.133		1.330	.190
	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	-.242	.097	-.259	-2.503	.016
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2)	.776	.132	.739	5.897	.000
	Sistem Pengendalian Internal (X3)	.353	.136	.338	2.604	.012

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa:

- 1) Nilai signifikansi variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) adalah sebesar 0,016, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (-2,503) lebih besar dari t tabel (1,678) hasil tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), sehingga membuktikan bahwa H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak.
- 2) Nilai signifikansi variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) adalah sebesar 0,000, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (5,879) lebih besar dari t tabel (1,678), hasil tersebut menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga membuktikan bahwa H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak.
- 3) Nilai signifikansi variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) adalah sebesar 0,012, dimana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (2,604) lebih besar dari t tabel (1,678), maka dapat dikatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal (X3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga membuktikan bahwa H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak.

2. Uji F (F test)

Uji statistik F adalah uji yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Hasil Uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.22

Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	101.962	3	33.987	47.350	.000 ^a
	Residual	33.018	46	.718		
	Total	134.980	49			

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal (X3), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2)

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan Uji F diatas, di dapat nilai F hitung sebesar 47,350 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan F hitung (47,350) lebih besar dari F tabel (2,81), maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Kualitas Laporan Keuangan Daerah atau dapat dikatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil uji determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.23
Uji R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.869 ^a	.755	.739	.84722

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal (X3), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2)

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas, besarnya angka koefisien determinasi (R²) adalah sebesar 0,755 atau 75,5%. Angka tersebut berarti bahwa sebesar 75,5% tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang terjadi dapat dijelaskan dengan variabel Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Sementara sisanya, yaitu 24,5% harus dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya.

F. Pembahasan

Dalam pembahasan ini yang akan diuraikan terkait dengan pembahasan mengenai kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Berkaitan dengan Pembuatan Laporan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian yang dilakukan kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara signifikan, karena signifikan kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan laporan keuangan

sebesar 0,016, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (2,503) lebih besar dari t tabel (1,678) hasil tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Dari hasil penelitian diatas juga membuktikan bahwa H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak, variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Dapat dikatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan menguasai laporan keuangan sehingga sumber daya manusia kompeten di bidang pembuatan laporan keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat mewujudkan kualitas laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sumber daya manusia sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi, karena sumber daya manusia berperan aktif terhadap jalannya suatu organisasi dan proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang terbaik yang dihasilkan oleh suatu sumber daya manusia yang menunjukkan kinerja seseorang dan kemampuannya untuk menganalisis suatu masalah dalam lingkup kerja dan jabatannya. Namun hal tersebut juga tidak terlepas dari kejelian dan ketepatan dalam proses menentukan seorang pegawai untuk berada dalam suatu pekerjaan dan jabatan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin baik sehingga laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh T. Asri Yunita yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2015) yang menunjukkan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, penelitian oleh Ade Saputra yang

berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan (2015) yang menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, penelitian oleh Putriasri Pujanira yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2017) yang menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, penelitian oleh Putri Syukria Lubis yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (2018) yang menunjukkan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian yang dilakukan penerapan standar akuntansi pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara signifikan, karena signifikan penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 0,000, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (5,879) lebih besar dari t tabel (1,678), hasil tersebut menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_2) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari hasil penelitian diatas juga membuktikan bahwa H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak, variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (X_2) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Dapat dikatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah sudah menerapkan standar akuntansi pemerintah dalam membuat laporan keuangan keuangan.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah memahami PP Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Penyusunan pedoman akuntansi sangat diperlukan karena mengingat adanya batas waktu bagi organisasi publik untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban yang berisi laporan keuangan semakin mendesak. Sehingga semakin menerapkan dengan memahami standar akuntansi pemerintah maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh T. Asri Yunita yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2015) yang menunjukkan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, penelitian oleh Ade Saputra yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan (2015) yang menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, penelitian oleh Putriasri Pujanira yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2017) yang menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Arlia Sari Artana yang berjudul Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2016) yang

menunjukkan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian yang dilakukan sistem pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara signifikan, karena signifikan sistem pengendalian internal sebesar 0,012, dimana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (2.604) lebih besar dari t tabel (1.678), maka dapat dikatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal (X_3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari hasil penelitian diatas juga membuktikan bahwa H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak, variabel sistem pengendalian internal (X_3) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal sudah berpengaruh baik terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan melakukan pengawasan Internal yaitu seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Sehingga semakin sistem pengendalian internal maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh T. Asri Yunita

yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2015) yang menunjukkan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, penelitian oleh Ade Saputra yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan (2015) yang menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, penelitian oleh Arlia Sari Artana yang berjudul Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2016) yang menunjukkan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri Syukria Lubis yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (2018) yang menunjukkan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Berkaitan dengan Pembuatan Laporan Keuangan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian yang dilakukan kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, penerapan standar akuntansi

pemerintah, dan sistem pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yaitu dilihat dari F hitung (47,350) lebih besar dari F tabel (2,81). Dalam hal ini berarti kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil penelitian diatas juga membuktikan bahwa H_{a4} diterima H_{04} ditolak, variabel sistem pengendalian internal (X_3) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Dapat dikatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal sudah baik dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Berkaitan dengan Pembuatan Laporan Keuangan Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji t, kompetensi sumber daya manusia (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y), sehingga membuktikan bahwa H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak. Dapat dikatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan menguasai laporan keuangan sehingga sumber daya manusia kompeten di bidang pembuatan laporan keuangan.

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji t, penerapan standar akuntansi pemerintah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y), sehingga membuktikan bahwa H_{a2} diterima H_{02} ditolak. Dapat dikatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah sudah menerapkan dan memahami standar akuntansi pemerintah dalam membuat laporan keuangan.

3. Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji t, sistem pengendalian internal (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y), sehingga

membuktikan bahwa H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak. Dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal sudah dijalankan dengan baik dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Berkaitan dengan Pembuatan Laporan Keuangan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji F, kompetensi sumber daya manusia (X_1), penerapan standar akuntansi pemerintah (X_2), dan sistem pengendalian internal (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga membuktikan bahwa H_{a4} diterima H_{04} ditolak. Dapat dikatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian internal sudah baik dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Untuk para pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Utara diharapkan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan dengan memberikan pelatihan-pelatihan teknis, pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah, dan pelaksanaan sistem pengendalian internal agar lebih serius terutama sebelum masuk masa-masa audit untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk para akademisi mahasiswa, maupun peneliti agar terus mengkaji dan mengembangkan serta menyempurnakan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang. Mengembangkan penelitian dapat diarahkan pada eksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiwan, Nyoman Triadi dan Rasmini, Ni Ketut. *Pengaruh Sistem Berbasis Akrual, TI, dan SPIP pada Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi SDM sebagai Moderasi” dalam E-journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2016.
- Akmal, Azhari Tarigan et. al. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Medan: La Tansa Press, 2011.
- Akmal, Azhari Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, Medan: FEBI Press, 2016.
- Artana, Arlia Sari. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Elsye, Rosmery et. al. *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Harahap, Isnaini et. al. *Hadis-hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ikhsan, Arfan. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah Tafsir*, Bandung: Sygma, 2010.

Kiranayanti, Ida Ayu Enny. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dalam E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 16.2, 2016.

Nordiawan, Deddi dan Ayunintyas Hertianti. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pujanira, Putriasri. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY” dalam Jurnal Nominal*, Vol. VI nomor 2, 2017.

Santoso, Singgih. *SPSS Mengolah Data Statistik secara Profesional*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 1999.

Siregar, Syofiyon. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sitompul, Syahman et. al. *Akuntansi Masjid*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015.

Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Prenadamedia, 2009.

Syukria, Putri Lubis. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada PD. Pasar Kota Medan*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU, 2018.

Teguh, Muhammad. *Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Ketenagakerjaan.

Catatan Berita Mei 2018 – BPK: Opini WTP Bukan Jaminan Tak Ada Kecurangan, <http://www.medan.bpk.go.id>.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2006-2018, <http://www.bpk.go.id>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kualitas”, <http://www.kbbi.kemendikbud.go.id>.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018, <http://www.medan.bpk.go.id>.

Zailani, Wakil Gubernur Sumatera Utara Deadline OPD dan BUMD Selesaikan Aset, <http://sumut.sindonews.com>.

LAMPIRAN I

Surat Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527480

Fax: (061)4153148 Medan 20119

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 - 586 /BKB.P/III/2020

1. Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
2. Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : B-0711/EB.I/PP.00.9/03/2020 Tanggal 02 Maret 2020 Perihal Rekomendasi Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- a.Nama : Mutia Aulia Safridha
b.Alamat : Medan
c.Pekerjaan : Mahasiswi
d.Nip/Nim/KTP : 0502163157
e.Judul : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus BPKAD Provinsi Sumatera Utara).
f.Lokasi/Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu.
g.Lamanya : 3 (Tiga) Bulan
h.Peserta : Sendiri
i.Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan, yang bersangkutan diwajibkan mematuhi Ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
a. Untuk pengawasan surat izin yang yang di keluarkan oleh Balitbang Provsu kami diberi tembusannya
b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peneliti, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Bakesbangpol Provsu
4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir b tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka rekomendasi ini tidak berlaku
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Ijin Penelitian.

Medan /0 Maret 2020


An.KABID PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL
KASUBBID KEWASPADAAN DINI EVALUASI
INFORMASI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

BENRI LIMBONG,S.SOS,M.Si
PEMBINA
NIP. 19630923 198409 1 001

Tembusan

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (Sebagai laporan)
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu
3. Ka Balitbang Provsu
4. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5. Pertinbal

Surat Telah Selesai Penelitian

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan P. Diponegoro Nomor 30 - Telepon 4156000

MEDAN

Medan, 18 Maret 2020

Nomor : 070/530/SFKR/2020
Lampiran :
Perihal : Telah Selesai Penelitian.

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
di -
Medan

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Nomor: 070-586/BKB.P/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, Perihal Rekomendasi Penelitian dan Surat Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : B-0711/EB.I/PP.00.9/03/2020 tanggal 02 Maret 2020, perihal Rekomendasi Penelitian atas nama

Nama : Mutia Aulia Safridha
NIM : 0502163157
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan ini kami menyatakan bahwasanya Mahasiswi tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan untuk urusan selanjutnya.

a.n. **KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**
Plh. SEKRETARIS


HALIMATUSSA'ADIAH, SE, M. AP
PEMBINA
NIP. 19660501 199007 2 001

LAMPIRAN II

Kuesioner

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS BPKAD PROVINSI SUMATERA UTARA)**

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Cara pengisian kuesioner adalah:
 - a. Semua pernyataan dijawab dengan cara memberikan tanda (√) pada salah satu jawaban yang tersedia dan paling tepat menurut persepsi Bapak/Ibu
 - b. Tidak ada benar atau salah dalam memberikan jawaban karena kami hanya memperhatikan pada suatu angka atau jawaban yang menunjukkan persepsi terbaik dari Bapak/Ibu
2. Terdapat beberapa pilihan pernyataan, yaitu:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

B. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia : Tahun
4. Pendidikan Terakhir :
5. Masa Kerja :

Daftar Pernyataan tentang Kompetensi SDM (X₁)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Sebagian besar sumber daya manusia pengelola keuangan yang bekerja di BPKAD Provinsi Sumatera Utara berlatar belakang pendidikan keuangan.					
2.	Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan, sehingga kecakapan manajerial pegawai sumber daya manusia pengelola keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara meningkat					
3.	Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan, sehingga pelayanan dari sumber daya manusia pengelola keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara meningkat					
4.	Pegawai yang bekerja di BPKAD Provinsi Sumatera Utara telah memahami teori-teori yang berkaitan dengan keuangan					
5.	Sumber daya manusia pengelola keuangan yang bekerja di BPKAD Provinsi Sumatera Utara telah memahami aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai aturan yang berlaku. (PP No. 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah)					
6.	Sumber daya manusia harus memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil laporan keuangan					

Daftar Pernyataan tentang Penerapan SAP (X₂)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya selalu menerapkan basis akrual dan basis kas untuk mengakui transaksi/peristiwa yang terjadi serta selalu menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran menggunakan akuntansi berbasis akrual dan mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto.					
2.	Saya selalu menyusun dan menyajikan LAK sesuai dengan SAP, dan menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi serta selalu menyajikan informasi secara lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.					
3.	Saya selalu mengakui dan mencatat persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi serta selalu mengakui kas yang telah dikeluarkan sebagai investasi setelah manfaat ekonomi potensi di masa yang akan datang dapat diperoleh dan nilai perolehan investasi dapat diukur.					
4.	Saya selalu mencatat/menilai aset tetap sebesar biaya perolehannya dan mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas serta selalu mengungkapkan informasi konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi dan memindahkan konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap yang bersangkutan.					
5.	Saya selalu mencatat kewajiban sebesar nilai nominal dan mengakui kewajiban pada saat kewajiban timbul serta selalu mengoreksi kesalahan melalui pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan berdasarkan SAP.					
6	Laporan keuangan konsolidasi pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan selalu mencakup laporan keuangan dari semua entitas akuntansi serta dalam laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola pemerintah daerah					

Daftar Pernyataan tentang Sistem Pengendalian Internal (X₃)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	BPKAD Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) secara tertulis					
2.	BPKAD Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan penentuan batas dan penentuan toleransi terhadap penilaian resiko					
3.	BPKAD Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko kegiatan pengendalian					
4.	BPKAD Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan sistem informasi untuk melaksanakan tanggungjawab					
5.	BPKAD Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan sistem akuntansi yang memungkinkan audit					
6.	Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi					

Daftar Pernyataan Tentang Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Laporan keuangan yang saya susun tepat waktu, sesuai pada SAP dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan saat ini dan masa yang akan datang serta mengkoreksi keputusan masa lalu.					
2.	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah jujur, benar menggambarkan transaksi dan peristiwa lainnya, dan memenuhi kebutuhan para pengguna serta tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya dan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material					
3.	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
4.	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun.					
5.	Laporan keuangan yang saya buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami.					
6.	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.					

LAMPIRAN III

Frekuensi Data Berdasarkan Identitas

Statistics

		Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Lama Bekerja
N	Valid	50	50	50	50
	Missing	0	0	0	0

LAMPIRAN IV

Hasil Uji Validitas

1. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₁)

		Correlations						Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
X1.1	Pearson Correlation	1.000	.320*	.189	.253	.122	.079	.558**
	Sig. (2-tailed)		.023	.189	.077	.397	.586	.000
	N	50.000	50	50	50	50	50	50
X1.2	Pearson Correlation	.320*	1.000	.200	-.158	.134	.025	.437**
	Sig. (2-tailed)	.023		.165	.272	.354	.862	.001
	N	50	50.000	50	50	50	50	50
X1.3	Pearson Correlation	.189	.200	1.000	.490**	.310*	.205	.690**
	Sig. (2-tailed)	.189	.165		.000	.029	.152	.000
	N	50	50	50.000	50	50	50	50
X1.4	Pearson Correlation	.253	-.158	.490**	1.000	.357*	.256	.618**
	Sig. (2-tailed)	.077	.272	.000		.011	.073	.000
	N	50	50	50	50.000	50	50	50
X1.5	Pearson Correlation	.122	.134	.310*	.357*	1.000	.383**	.652**
	Sig. (2-tailed)	.397	.354	.029	.011		.006	.000
	N	50	50	50	50	50.000	50	50
X1.6	Pearson Correlation	.079	.025	.205	.256	.383**	1.000	.556**
	Sig. (2-tailed)	.586	.862	.152	.073	.006		.000
	N	50	50	50	50	50	50.000	50
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	Pearson Correlation	.558**	.437**	.690**	.618**	.652**	.556**	1.000
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50.000

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X₂)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2)
X2.1	Pearson Correlation	1.000	.405**	.097	.357*	.189	-.021	.685**
	Sig. (2-tailed)		.004	.504	.011	.189	.885	.000
	N	50.000	50	50	50	50	50	50
X2.2	Pearson Correlation	.405**	1.000	.138	.517**	.182	.225	.769**
	Sig. (2-tailed)	.004		.339	.000	.206	.116	.000
	N	50	50.000	50	50	50	50	50
X2.3	Pearson Correlation	.097	.138	1.000	.149	.175	.036	.283*
	Sig. (2-tailed)	.504	.339		.300	.224	.803	.046
	N	50	50	50.000	50	50	50	50
X2.4	Pearson Correlation	.357*	.517**	.149	1.000	.092	.208	.721**
	Sig. (2-tailed)	.011	.000	.300		.527	.148	.000
	N	50	50	50	50.000	50	50	50
X2.5	Pearson Correlation	.189	.182	.175	.092	1.000	.206	.522**
	Sig. (2-tailed)	.189	.206	.224	.527		.151	.000
	N	50	50	50	50	50.000	50	50
X2.6	Pearson Correlation	-.021	.225	.036	.208	.206	1.000	.360*
	Sig. (2-tailed)	.885	.116	.803	.148	.151		.010
	N	50	50	50	50	50	50.000	50
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2)	Pearson Correlation	.685**	.769**	.283*	.721**	.522**	.360*	1.000
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.046	.000	.000	.010	
	N	50	50	50	50	50	50	50.000

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X₃)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Sistem Pengendalian Internal (X3)
X3.1	Pearson Correlation	1.000	.332 [*]	.356 [*]	-.050	.208	.152	.570 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.019	.011	.730	.147	.291	.000
	N	50.000	50	50	50	50	50	50
X3.2	Pearson Correlation	.332 [*]	1.000	.160	-.003	.214	.122	.537 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.019		.267	.982	.137	.399	.000
	N	50	50.000	50	50	50	50	50
X3.3	Pearson Correlation	.356 [*]	.160	1.000	.361 ^{**}	.333 [*]	.323 [*]	.738 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.011	.267		.010	.018	.022	.000
	N	50	50	50.000	50	50	50	50
X3.4	Pearson Correlation	-.050	-.003	.361 ^{**}	1.000	.227	.198	.514 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.730	.982	.010		.112	.168	.000
	N	50	50	50	50.000	50	50	50
X3.5	Pearson Correlation	.208	.214	.333 [*]	.227	1.000	.292 [*]	.576 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.147	.137	.018	.112		.039	.000
	N	50	50	50	50	50.000	50	50
X3.6	Pearson Correlation	.152	.122	.323 [*]	.198	.292 [*]	1.000	.579 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.291	.399	.022	.168	.039		.000
	N	50	50	50	50	50	50.000	50
Sistem Pengendalian Internal (X3)	Pearson Correlation	.570 ^{**}	.537 ^{**}	.738 ^{**}	.514 ^{**}	.576 ^{**}	.579 ^{**}	1.000
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50.000

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

		Correlations						Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	
Y.1	Pearson Correlation	1.000	.205	.181	.148	.147	.153	.375**
	Sig. (2-tailed)		.153	.209	.306	.310	.288	.007
	N	50.000	50	50	50	50	50	50
Y.2	Pearson Correlation	.205	1.000	.309*	.194	.222	.254	.645**
	Sig. (2-tailed)	.153		.029	.176	.122	.075	.000
	N	50	50.000	50	50	50	50	50
Y.3	Pearson Correlation	.181	.309*	1.000	.203	.299*	.259	.651**
	Sig. (2-tailed)	.209	.029		.158	.035	.070	.000
	N	50	50	50.000	50	50	50	50
Y.4	Pearson Correlation	.148	.194	.203	1.000	.204	.251	.594**
	Sig. (2-tailed)	.306	.176	.158		.155	.079	.000
	N	50	50	50	50.000	50	50	50
Y.5	Pearson Correlation	.147	.222	.299*	.204	1.000	.253	.608**
	Sig. (2-tailed)	.310	.122	.035	.155		.076	.000
	N	50	50	50	50	50.000	50	50
Y.6	Pearson Correlation	.153	.254	.259	.251	.253	1.000	.625**
	Sig. (2-tailed)	.288	.075	.070	.079	.076		.000
	N	50	50	50	50	50	50.000	50
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Pearson Correlation	.375**	.645**	.651**	.594**	.608**	.625**	1.000
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50.000

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN V

Hasil Jawaban Responden

Responden	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)						Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
1	4	4	4	5	5	5	27
2	4	4	4	4	4	5	25
3	5	5	4	4	5	4	27
4	5	5	4	4	5	5	28
5	4	4	4	4	4	4	24
6	5	4	4	5	4	5	27
7	5	4	4	5	4	5	27
8	4	4	4	4	5	5	26
9	4	4	3	3	3	4	21
10	4	5	4	4	4	5	26
11	4	4	5	5	4	4	26
12	5	4	4	5	4	4	26
13	4	5	5	4	4	5	27
14	5	4	4	4	4	5	26
15	5	4	4	4	4	4	25
16	4	4	4	4	4	4	24
17	5	5	5	4	4	4	27
18	4	5	5	4	4	5	27
19	5	5	4	4	5	4	27
20	5	5	5	5	4	4	28
21	5	4	5	4	4	4	26
22	4	4	4	4	5	4	25
23	4	4	3	3	3	3	20
24	4	4	5	5	4	4	26
25	5	4	5	5	5	5	29
26	5	5	5	4	4	4	27
27	5	5	4	4	4	4	26
28	4	5	4	4	5	4	26
29	4	5	4	4	4	4	25
30	4	4	4	4	4	4	24
31	5	5	4	4	4	4	26
32	4	4	3	4	4	4	23
33	4	5	4	4	4	4	25
34	5	5	4	4	4	4	26

35	5	5	4	4	4	5	27
36	5	5	5	4	4	4	27
37	4	4	4	4	4	4	24
38	4	4	5	4	5	5	27
39	4	4	4	4	4	4	24
40	4	5	4	4	4	4	25
41	4	4	4	4	4	4	24
42	4	5	4	4	4	5	26
43	5	5	4	4	5	5	28
44	5	5	4	4	4	5	27
45	5	5	4	4	4	4	26
46	4	4	3	3	3	4	21
47	5	4	4	5	4	4	26
48	5	4	4	4	4	5	26
49	5	5	4	4	4	4	26
50	5	5	4	4	4	4	26

Responden	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2)						Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	4	4	4	5	4	4	25
2	4	4	4	3	4	4	23
3	4	5	4	5	5	4	27
4	5	5	4	5	5	4	28
5	4	4	4	4	4	4	24
6	5	5	4	5	4	4	27
7	5	5	4	5	5	4	28
8	5	4	4	4	5	4	26
9	4	4	3	4	4	4	23
10	5	5	4	5	4	4	27
11	5	5	4	5	5	4	28
12	5	5	4	5	4	4	27
13	5	4	4	5	5	4	27
14	5	5	4	5	4	4	27
15	4	4	4	4	5	4	25
16	3	4	4	4	4	4	23
17	5	5	4	5	5	4	28
18	4	5	4	5	5	5	28
19	4	5	4	5	4	4	26
20	5	4	4	5	5	4	27

21	5	5	4	4	5	4	27
22	4	4	4	4	5	4	25
23	4	5	4	5	5	4	27
24	4	5	4	5	5	4	27
25	5	5	4	5	5	5	29
26	4	5	4	4	5	4	26
27	4	5	4	4	5	4	26
28	5	5	4	5	5	4	28
29	4	5	4	5	4	4	26
30	4	4	4	4	5	4	25
31	4	4	4	4	5	4	25
32	4	4	4	4	4	4	24
33	4	4	4	4	5	4	25
34	4	5	4	5	4	4	26
35	5	5	4	5	4	4	27
36	4	5	4	5	5	5	28
37	5	4	4	4	4	4	25
38	5	5	4	5	5	4	28
39	4	4	4	4	5	4	25
40	4	4	4	4	4	4	24
41	5	4	4	5	4	4	26
42	4	4	4	5	5	4	26
43	4	5	4	5	5	4	27
44	4	4	4	5	5	4	26
45	4	5	4	5	4	4	26
46	3	3	4	4	4	4	22
47	5	5	4	4	5	4	27
48	5	4	4	5	5	4	27
49	4	4	4	4	4	4	24
50	5	5	4	4	5	4	27

Responden	Sistem Pengendalian Internal (X3)						Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
1	4	4	5	5	4	4	26
2	4	4	4	4	3	4	23
3	5	5	5	5	4	4	28
4	5	5	5	4	4	4	27
5	4	4	4	4	4	4	24
6	5	5	4	4	4	4	26

7	5	4	5	5	4	4	27
8	4	4	5	4	4	5	26
9	4	4	4	4	3	3	22
10	4	4	5	5	4	4	26
11	5	5	5	4	4	4	27
12	4	5	4	5	4	5	27
13	4	5	5	5	4	4	27
14	4	4	4	5	4	5	26
15	4	4	4	4	4	4	24
16	4	4	4	4	4	4	24
17	4	5	4	5	4	4	26
18	5	5	5	5	4	5	29
19	4	5	5	5	4	4	27
20	5	5	4	4	4	4	26
21	4	5	5	4	4	4	26
22	4	5	4	5	3	4	25
23	4	5	4	4	4	4	25
24	5	4	5	5	4	4	27
25	5	5	5	5	4	5	29
26	4	4	5	5	4	4	26
27	4	5	5	5	4	4	27
28	5	5	5	4	4	4	27
29	4	4	4	5	4	4	25
30	4	5	4	4	4	4	25
31	4	4	4	4	4	4	24
32	4	4	4	4	3	4	23
33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	4	4	4	4	4	24
35	5	5	5	4	4	5	28
36	4	5	5	5	4	5	28
37	5	5	5	4	4	5	28
38	4	4	5	5	4	5	27
39	4	5	4	4	4	4	25
40	4	5	4	4	4	4	25
41	5	4	4	5	4	4	26
42	4	5	4	5	4	4	26
43	5	5	5	5	4	4	28
44	4	4	5	5	4	4	26
45	4	5	5	5	4	4	27
46	4	4	4	4	3	4	23

47	4	5	4	5	4	4	26
48	4	4	5	5	4	4	26
49	4	4	4	5	4	4	25
50	4	4	5	5	4	5	27

Responden	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)						Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	
1	4	5	4	4	4	4	25
2	4	4	4	3	4	4	23
3	4	5	5	5	4	4	27
4	4	5	5	4	5	4	27
5	4	4	4	4	4	4	24
6	4	4	5	4	5	4	26
7	4	5	5	5	4	5	28
8	4	5	5	4	4	5	27
9	4	4	4	4	4	4	24
10	4	4	4	5	4	5	26
11	4	5	5	4	5	5	28
12	4	5	5	5	4	4	27
13	4	5	4	4	4	4	25
14	4	5	4	5	5	4	27
15	4	4	4	4	4	4	24
16	3	4	4	4	4	4	23
17	4	5	4	5	5	5	28
18	4	5	5	5	5	5	29
19	4	5	4	5	4	5	27
20	4	4	5	4	4	5	26
21	4	5	4	5	5	5	28
22	4	4	4	5	4	4	25
23	4	5	5	4	5	5	28
24	4	5	5	4	5	5	28
25	4	5	5	5	5	5	29
26	4	5	4	4	4	5	26
27	4	4	5	4	4	4	25
28	4	5	5	5	4	5	28
29	4	5	4	4	4	4	25
30	4	5	4	4	4	4	25
31	3	4	4	4	4	4	23
32	4	4	4	4	4	4	24

33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	5	5	4	5	4	27
35	4	5	4	4	4	4	25
36	4	5	5	4	5	5	28
37	4	5	4	5	5	4	27
38	4	4	5	5	5	4	27
39	4	4	4	4	4	4	24
40	4	4	4	4	4	5	25
41	4	4	4	5	4	5	26
42	4	5	5	5	4	4	27
43	4	4	5	5	5	5	28
44	4	4	4	4	5	4	25
45	4	4	4	5	5	4	26
46	4	3	4	4	4	4	23
47	4	4	5	5	4	4	26
48	4	5	5	5	4	4	27
49	4	5	4	4	4	4	25
50	4	5	5	4	4	4	26

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Mutia Aulia Safridha
2. NIM : 0502163157
3. TTL : Jakarta, 13 Juni 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Jalan Taruna Jaya RT.014/005, Kelurahan Cibubur,
Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN 05 Pagi Cibubur Berijazah Tahun 2010
2. Tamatan MTsN 22 Jakarta Berijazah Tahun 2013
3. Tamatan SMKN 51 Jakarta Berijazah Tahun 2016
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2020

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. English Club MtsN 22 Jakarta (2011)
2. Pramuka MtsN 22 Jakarta (2011)
3. Paskibra MtsN 22 Jakarta (2011)
4. Jurnalistik SMKN 51 Jakarta (2015)
5. English Club SMKN 51 Jakarta (2015)
6. KSPMS Golden UINSU (2017)
7. International Peace Youth Group (2018)